

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN TURKI BERSAMA ISRAEL DAN PERAN TURKI DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA

Pada era Pemerintahan *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP), politik dalam negeri maupun luar negeri Turki mulai mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemenangan Partai AKP pada tahun 2002 telah memberikan pengaruh yang besar bagi Turki. Terlebih, ketika partai AKP kembali meraih kemenangannya pada periode kedua pemerintahan dimana Pemerintah Turki telah menunjukkan perubahan orientasinya yang sebelumnya pro-Barat menjadi lebih multi-dimensi. Perubahan orientasi politik luar negeri Turki tersebut telah berpengaruh terhadap hubungan Turki dan Israel yang telah berlangsung sejak lama. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Erdoğan di bawah Pemerintah AKP telah menunjukkan dukungan aktifnya kepada rakyat Palestina yang kemudian aksi tersebut telah menunjukkan dinamika hubungan Turki dan Israel yang mengalami pasang surut. Dukungan Turki terhadap Palestina di dalam konflik Israel-Palestina mulai dilakukan ketika Turki berada di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Bulent Ecevit dan mulai intensif dilakukan di bawah Pemerintahan AKP. Intensifnya aksi-aksi Turki yang mendukung Palestina dan melakukan pengecaman atas penyerangan-penyerangan Israel terhadap Palestina pada konflik Israel dan Palestina telah berpengaruh terhadap hubungan Turki dan Israel yang mengalami dinamika.

Secara sederhana, bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai sejarah panjang konflik Israel dan Palestina. Sedangkan sub bab kedua akan membahas mengenai dinamika hubungan Turki bersama Israel yang dimulai sejak sebelum Pemerintahan AKP hingga saat Pemerintahan AKP memimpin Pemerintahan Turki. Pada sub bab terakhir akan dibahas mengenai peran Turki dalam konflik Israel dan Palestina.

2.1 Konflik Israel dan Palestina

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina sejatinya bukan merujuk pada permasalahan perbedaan agama yang dimiliki satu sama lain melainkan fokus pada permasalahan klaim kepemilikan tanah Palestina oleh kedua belah pihak. Baik Israel dan Palestina mengklaim bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang pernah mereka huni sejak 3000 tahun silam dimana Israel yang dulu menyebut dirinya sebagai *Bnei Israel* percaya bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan (Violita, 2010). Ketika masyarakat Palestina pada masa itu menetap di sekitar Pantai Palestina, Israel di sisi lain menetap di bukit-bukit di wilayah tersebut secara bersamaan dimana 200 tahun kemudian atau tepatnya sekitar 1000 tahun Sebelum Masehi (SM), Israel mendirikan Kerajaan Israel di wilayah tersebut (Violita, 2010). Namun, kehadiran bangsa Yahudi di tanah Palestina mulai hilang ketika pada akhirnya Kerajaan Israel dapat ditaklukan oleh kerajaan Assyria, Babylon, Romawi, maupun Ottoman pada tahun 700 SM.

Pada dasarnya, konflik Israel dan Palestina mulai muncul ketika dibentuk Deklarasi Balfour oleh Inggris pada tanggal 2 November 1917. Isi dari deklarasi tersebut menyebutkan bahwa Inggris menjanjikan tanah kampung halaman bagi Yahudi di Palestina ketika bangsa Yahudi setuju untuk beraliansi bersama Inggris dalam menghadapi aliansi Turki (dahulu Kekaisaran Ottoman) dan Jerman pada Perang Dunia I. Ketika pada akhirnya Inggris menjadi negara pemenang dalam Perang Dunia I, Inggris kemudian memiliki wewenang untuk menguasai daerah-daerah yang menjadi bagian teritori dari kekuasaan Turki maupun Jerman berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB), termasuk wilayah Palestina. Inggris turut memenuhi janjinya untuk memberikan kampung halaman Palestina kepada bangsa Yahudi atau Israel. Pemberian tanah Palestina terhadap Israel telah mendorongnya untuk melakukan imigrasi secara besar-besaran dari kawasan Eropa untuk kembali ke tanah Palestina. Sejak berakhirnya Perang Dunia I hingga Perang Dunia II, jumlah imigran Israel yang menetap di tanah Palestina mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini kemudian memunculkan kecemasan dan aksi pemberontakan dari negara-negara Arab Palestina yang menolak kehadiran

imigran bangsa Yahudi di tanah Palestina. Aksi-aksi pemberontakan yang terus mengalami eskalasi hingga terjadinya krisis antara negara Arab Palestina dan Israel telah mendorong Inggris untuk mundur secara resmi dari Palestina dan menyerahkan mandat tanah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam merespon krisis yang terjadi antara Israel dan Palestina, PBB melalui UNSCOP (*United Nations Special Committee on Palestine*) kemudian mengeluarkan rencana pemisahan atau *UN Partition Plan* pada tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian dimana Israel mendapatkan 54% bagian dari total wilayah Palestina dan sisanya sebanyak 46 % menjadi wewenang dari Palestina (Said, 2018). Rencana pemisahan tersebut mendapatkan penolakan dari negara Arab Palestina yang menginginkan tanah Palestina secara keseluruhan dimiliki oleh negara Palestina. Namun di sisi lain, Israel justru menerima rekomendasi PBB tersebut dan secara sepihak mendeklarasikan diri kemerdekaan negara Israel di tanah Palestina pada tanggal 14 Mei 1948 (Violita, 2010).

Gambar 2.1 Pembagian Wilayah Palestina berdasarkan Rekomendasi *UN Partition Plan* dari PBB Tahun 1947



Sumber: The New York Times. (2011). Nov. 29, 1947 | *U.N. Partitions Palestine, Allowing for Creation of Israel*. Diakses pada <<https://learning.blogs.nytimes.com/2011/11/29/nov-29-1947-united-nations-partitions-palestine-allowing-for-creation-of-israel/>>.

Aksi unilateral yang dilakukan Israel telah menyulutkan kemarahan dari negara-negara Arab yang turut menolak rencana pembagian wilayah yang direkomendasikan oleh PBB. Alhasil, konflik antara Israel dan Palestina kemudian melebar menjadi konflik antara Israel dan negara-negara Arab yang menunjukkan dukungannya terhadap negara Arab Palestina dengan munculnya Perang Arab-Israel pada tahun 1948, Perang Israel-Mesir tahun 1956, Perang Enam Hari tahun 1967, dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Keseluruhan perang yang terjadi antara tahun 1948 hingga 1973 berhasil dimenangkan oleh Israel dimana Israel memanfaatkan kemenangannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Semenanjung Sinai, Dataran Tinggi Golan, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Terusan Suez selama perang tersebut terjadi (Violita, 2010).

Aksi-aksi perang yang telah terjadi dengan diikuti adanya pendudukan beberapa wilayah di Timur Tengah oleh Israel telah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk meresponnya dengan mengeluarkan dua resolusi utama, yaitu: Resolusi No. 242 tahun 1967 yang mendesak Israel untuk menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya selama Perang Enam Hari tahun 1967 dan Resolusi No. 338 tahun 1973 yang menegaskan kepada para pihak yang bersengketa untuk menghentikan perang dan menghendaki dilakukannya negosiasi yang berdasarkan pada Resolusi 242 (Muhamad, 2015). Selain itu, diadakan pula negosiasi *Camp David* pada tahun 1978 dalam merespon perang yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab dengan menghasilkan dua kesepakatan utama, yaitu: (i) penentuan masa depan wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat (West Bank) sebagai wilayah otonomi penuh untuk masyarakat Palestina di bawah pengawasan Yordania; dan (ii) perjanjian damai antara Israel dan Mesir yang ditandatangani pada tahun 1979, yang di dalamnya termasuk dikembalikannya Semenanjung Sinai yang telah dikuasai oleh Israel sejak berlangsungnya Perang Enam Hari tahun 1967 (Violita, 2010).

Meskipun beberapa upaya perdamaian telah dilakukan antara Israel dan negara-negara Arab, konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina belum menemukan titik terang. Hal ini dikarenakan, berdirinya negara merdeka Israel telah

mendorongnya untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang dimilikinya dengan berbagai cara, tak terkecuali melalui kebijakan-kebijakan Israel yang menekan masyarakat Palestina hingga penggunaan aksi-aksi kekerasan. Kemerdekaan Israel di atas tanah Palestina yang ditambah dengan pendudukan Israel di sekitar wilayah Yerusalem, Jalur Gaza, maupun Tepi Barat yang seharusnya menjadi wilayah otonomi Palestina telah mendorong munculnya suatu fenomena Intifada. Intifada merupakan suatu ledakan kemarahan dari generasi muda Palestina dan masyarakat miskin Palestina yang kemudian berubah menjadi aksi-aksi pemberontakan yang ditujukan kepada Israel dan otoritas Palestina yang tak kunjung memberikan kepastian terkait dengan nasib Palestina (Violita, 2010). Fenomena Intifada tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya kelompok-kelompok gerakan perlawanan yang melakukan aksi-aksi kekerasan, seperti: pelemparan batu, penusukan, penembakan, pelemparan bom, dan serangan bom bunuh diri yang ditujukan pada Israel dalam tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Violita, 2010). Beberapa kelompok tersebut, meliputi: kelompok Al-Fatah yang terbentuk pada tahun 1958 yang didominasi oleh generasi muda Palestina, terbentuknya PLO (*Palestinian Liberation Organization*) yang diprakarsai oleh Liga Arab pada tahun 1964 sebagai suatu organisasi yang mewakili rakyat Palestina dalam perjuangannya meraih kemerdekaan Palestina, kelompok *Islamic Jihad* yang terbentuk pada akhir tahun 1970an, dan kelompok *Al Aqsa Martyrs Brigade*.

Aksi-aksi penyerangan dari kelompok-kelompok militan Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina mendapatkan respon balik dari Pemerintah Israel dengan melakukan aksi-aksi kekerasan yang lebih keras. Contohnya saja, munculnya fenomena Al-Aqsa Intifada pada tahun 2000 atas kunjungan Ariel Sharon selaku pemimpin Partai Likud ke Masjid Al-Aqsa pada tanggal 28 September 2000 (Bayraktar, 2019). Kunjungan Sharon ke Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem dipandang masyarakat Palestina sebagai suatu tindakan unilateral Israel dalam menentukan status Yerusalem tanpa menerima penyelesaian terkait status Yerusalem melalui jalan negosiasi. Tidak berhenti sampai disitu, ketika Ariel Sharon terpilih mejadi Perdana Menteri Israel pada tahun 2001, ia kemudian melakukan

kebijakan-kebijakan unilateral lainnya yang merugikan masyarakat Palestina, seperti: dibangunnya pos-pos keamanan yang menjadi penghalang garis perbatasan antara Israel dan Palestina berdasarkan kesepakatan bersama tahun 1967 dan aksi-aksi penyerangan tentara Israel di sekitar Tepi Barat dan Jalur Gaza yang menewaskan 3.315 warga Palestina (Bayraktar, 2019). Tak berhenti sampai disitu, aksi-aksi penyerangan tentara Israel kembali terjadi pada tahun 2002 dimana tentara Israel melakukan penyerangan di kamp-kamp pengungsi dan menghancurkan gedung-gedung markas besar kepolisian Palestina di Kota Jenin, Tepi Barat (VOA Indonesia, 2001).

Pada tanggal 27 Desember 2008, Israel kembali melakukan aksi-aksi penyerangan dengan melancarkan Operasi *Cast Lead* di Jalur Gaza yang menargetkan basis-basis Hamas, gedung-gedung kepolisian, pemerintahan, rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, maupun masjid. Atas dilakukannya operasi tersebut, sebanyak 1.284 masyarakat di sekitar Gaza tewas dan 4.336 orang lainnya mengalami luka-luka (Bayraktar, 2019). Bahkan pada tahun 2015, konflik antara Israel dan Palestina kembali mengalami ketegangan ketika Pemerintah Israel memberlakukan aturan ketat terhadap masyarakat Palestina terkait dengan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur sebagai wilayah yang sedang diduduki Israel. Aturan ketat tersebut memberikan batasan bagi warga Palestina dimana hanya masyarakat yang berusia 45 tahun ke atas yang diizinkan untuk menunaikan shalat Jumat di masjid maupun memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa (Muhamad, 2015). Dalam aturan tersebut Israel turut meningkatkan penjagaannya dengan mengerahkan ribuan polisi ke sudut-sudut kota serta memasang alat deteksi logam di beberapa pintu masuk Kota Lama Yerusalem (The Old City of Jerusalem) (Muhamad, 2015). Kebijakan tersebut memicu kemarahan warga Palestina yang kemudian meresponnya dengan melakukan aksi-aksi penyerangan yang berimplikasi pada lebih dari 50 warga Palestina tewas, 10 warga Israel tewas, dan lebih dari 1.900 orang Palestina lainnya mengalami luka-luka (Muhamad, 2015).

Pada dasarnya, aksi-aksi kekerasan dan penyerangan yang dilakukan masyarakat Palestina terhadap Pemerintah Israel juga dilatarbelakangi oleh isu

perbatasan antara Israel dan Palestina. Hal ini dikarenakan Israel melakukan pembangunan pemukiman bagi masyarakatnya di wilayah Palestina yang kemudian berimplikasi pada semakin berkurang atau surutnya wilayah otonom yang dimiliki oleh Palestina atas adanya penghancuran rumah-rumah dan pengusiran warga Palestina di sekitar wilayah Tepi Barat dan Yerussalem hingga saat ini (Muhamad, 2015).

Gambar 2.2 Peta Wilayah Palestina Sejak Tahun 1947 hingga Saat ini



Sumber: Simela Victor Muhamad. (2015). Konflik Israel-Palestina dan Prospek Perdamaian. *Info Singkat Hubungan Internasional*.

Pada gambar tersebut terlihat jelas mengenai transformasi kepemilikan tanah yang semula berada di tangan Palestina pada tahun 1947 kemudian secara berangsur-angsur mengalami perubahan. Perubahan pertama kali terlihat ketika PBB mengeluarkan rekomendasi pembagian wilayah antara Palestina dan Israel yang dikenal dengan sebutan *UN Partition Plan* dimana masing-masing negara mendapatkan tanah sebesar 46% dan 54%. Tanah Palestina kembali berkurang atas adanya beberapa perang yang terjadi antara negara-negara Arab dan Israel pada tahun 1949 hingga 1967 yang berujung pada kemenangan Israel terhadap negara-negara Arab yang mejadikannya mampu menguasai beberapa wilayah di sekitar kawasan Timur Tengah. Tidak berhenti sampai disitu, keengganan Israel untuk

mengembalikan wilayah otonom Tepi Barat dan Jalur Gaza kepada Palestina sesuai yang tercantum pada kesepakatan *Camp David* ditambah dengan kebijakan Israel dalam membangun pemukiman bagi masyarakat Israel di wilayah tersebut telah berimplikasi pada semakin berkurangnya wilayah otonom yang dimiliki Palestina hingga saat ini.

2.1.1 Peran Regional dalam Konflik Israel Palestina

Konflik Israel Palestina yang telah terjadi sejak tahun 1967 telah memunculkan perhatian dari banyak pihak, khususnya negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab yang telah melewati berbagai konflik dengan Israel yang berujung pada munculnya konflik Israel Palestina yang masih bertahan hingga saat ini telah membawa negara-negara Arab tersebut untuk berperan dan terlibat di dalam konflik tersebut. Dalam peranannya, Arab Saudi merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang terlibat dan berperan besar dalam kolaborasinya bersama Liga Arab untuk mengatasi konflik Israel-Palestina.

Menurut Joseph Kostiner (2009) dalam artikelnya yang berjudul "*Saudi Arabia and the Arab-Israeli Peace Process: The Fluctuations of Regional Coordination*" menyebutkan bahwa keterlibatan Arab Saudi dalam percaturan konflik Arab Israel, yang di dalamnya termasuk membahas konflik Israel Palestina didasarkan atas perannya sebagai koordinator kawasan (*regional coordinator*). Koordinator kawasan disini mengarah kepada kemampuan Arab Saudi untuk dapat menghubungkan negara-negara Arab dengan negara-negara *superpower* untuk dapat berkoordinasi bersama dalam membawa stabilitas di kawasan Timur Tengah. Beberapa proposal perdamaian yang pernah diajukan Arab Saudi dalam membawa stabilitas di kawasan Timur Tengah, meliputi *Fahd Plan* tahun 1981 dan API (*Arab Peace Initiative*) tahun 2002.

Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Khalid bin Abdulaziz Al Saud dengan Putra Mahkota Fahd bin Abdulaziz Al Saud memainkan perannya sebagai mediator di kawasan dengan menginisiasi terbentuknya proposal perdamaian yang dikenal dengan sebutan *Fahd Plan* tahun 1981. *Fahd Plan* memiliki tujuan utama untuk fokus dalam menyelesaikan isu Palestina serta sebagai suatu forum dalam

mengumpulkan seluruh negara-negara Arab untuk dapat bersatu dikala banyak terjadi konflik di antara satu negara dengan negara lainnya di kawasan pada masa itu. Proposal perdamaian tersebut memiliki delapan poin utama dimana keenam poin pertamanya memiliki fokus utama dalam meminta Israel untuk mundur dari seluruh wilayah yang didudukinya dari negara-negara Arab pada tahun 1967 (Kostiner, 2009). Sedangkan pada poin ketujuh dan kedelapan masing masing menyebutkan bahwa seluruh negara Timur Tengah memiliki hak untuk hidup secara damai serta menjamin pengimplementasian ketujuh poin sebelumnya oleh PBB (Kostiner, 2009). Namun dalam pelaksanaannya, proposal damai tersebut tidak mendapatkan dukungan dari Suriah yang memandang proposal tersebut kurang memberikan hak-hak yang cukup bagi Palestina dan tidak memberikan batasan waktu bagi Israel untuk mundur dari wilayah yang didudukinya di kawasan Timur Tengah. Artinya, *Fahd Plan* masih mengutamakan tujuan utama yang menuntut Israel untuk mundur dari segala wilayah yang diduduki sejak tahun 1967 tanpa memberikan batasan waktu yang jelas bagi Israel untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, proposal damai yang masih berfokus pada tuntutan mundurnya Israel dari wilayah yang didudukinya tidak memberikan hak-hak yang memadai bagi Palestina mengingat hak-hak Palestina yang tertindas akibat wilayahnya yang diduduki oleh Israel.

Penolakan Suriah terhadap *Fahd Plan* mulai berubah pada tahun 1982 ketika Arab Saudi mulai mencari dukungan Suriah dengan berkonsultasi terkait poin-poin yang tertera pada proposal damai tersebut. Alhasil, Arab Saudi mulai memperkenalkan kembali *Fahd Plan* pada pertemuan Liga Arab berikutnya yang dilaksanakan pada tahun 1982. Pada pertemuan tersebut, terdapat perubahan pada poin ketujuh yang sebelumnya menekankan hak untuk hidup bagi seluruh negara di kawasan Timur Tengah yang dirubah menjadi jaminan perdamaian bagi seluruh negara di kawasan Timur Tengah, termasuk di dalamnya dibentuknya negara Palestina merdeka yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB (Kostiner, 2009). Atas dasar tersebut, *Fahd Plan* kemudian diakui sebagai program Arab untuk perdamaian oleh Liga Arab yang diterima oleh Suriah maupun PLO (Dishon & Maddy-Weitzman, 1982).

Dibentuknya *Fahd Plan* yang mulai diperkenalkan pada tahun 1981 dan mengalami perubahan pada poin ketujuh hingga diperkenalkan kembali pada tahun 1982 merepresentasikan inisiatif dari Arab Saudi yang lebih menekankan penyelesaian perdamaian secara komprehensif dengan melibatkan seluruh negara Arab. Hal ini dikarenakan Raja Khalid bin Abdulaziz Al Saud menyebutkan bahwa Arab Saudi menolak penyelesaian perdamaian yang dilakukan secara unilateral ataupun dilakukan secara bilateral yang hanya melibatkan pihak-pihak yang bertikai (Kostiner, 2009). Arab Saudi memandang penyelesaian secara unilateral atau bilateral semacam itu hanya akan menghasilkan kesepakatan secara tertutup yang kemudian kesepakatan tersebut akan meregangkan hubungan dari pihak-pihak yang bertikai dari negara-negara Arab lainnya dikarenakan sifatnya yang internal atau tertutup (Kostiner, 2009). Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Arab Saudi memilih untuk membuat pengaturan proposal perdamaian yang dapat membawa negara-negara Arab untuk berkumpul bersama dan memberikan insentif yang memadai bagi setiap negara Arab untuk menyepakati proposal perdamaian tersebut.

Selain itu, Arab Saudi turut menginisiasi terbentuknya *the Arab Peace Initiatives* (API) melalui pertemuan Liga Arab di Beirut, Lebanon pada tahun 2002. Pada pertemuan Liga Arab tersebut, Arab Saudi melalui Putra Mahkota Abdullah bin Abdulaziz Al Saud memberikan inisiatif ide perdamaian yang berfokus pada penerimaan secara penuh negara Israel di Timur Tengah jika Israel mundur dari seluruh wilayah Palestina yang didudukinya sejak tahun 1967 (Friedman, 2002). Inisiatif perdamaian tersebut secara umum terdiri dari tiga poin utama, yaitu (Kostiner, 2009): (i) Israel diharuskan untuk mundur dari seluruh wilayah yang didudukinya sejak tahun 1967. Ketika poin pertama ini dilaksanakan oleh Israel maka Palestina diharapkan akan mendapatkan kendali penuh atas wilayahnya sendiri sehingga nantinya Palestina dapat membentuk negara merdeka secara penuh; (ii) dilakukan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab ketika Israel telah memenuhi poin pertama. Poin kedua ini mengisyaratkan adanya upaya kolektif dari seluruh negara Arab yang sepakat akan menjalin hubungan dengan Israel ketika Israel setuju untuk mengakhiri konflik dengan mundur dari seluruh wilayah yang

didudukinya di Timur Tengah; (iii) mencantumkan ketentuan terkait dengan isu pengungsi Palestina yang berdasar pada Resolusi PBB No. 194 tahun 1949 yang menekankan pada *'the right to return'*. Pada inisiatif proposal perdamaian Arab sebelumnya, isu terkait masalah pengungsi Palestina seringkali dikecualikan pada poin-poin ketentuannya dikarenakan isu tersebut merupakan isu sensitif untuk dibahas. Selain itu, isu masalah pengungsi Palestina menjadi isu yang memberatkan Israel untuk diterima. Secara singkat, proposal perdamaian API menekankan pada penghentian konflik Israel-Palestina secara permanen yang diikuti dengan perdamaian komprehensif dan pembentukan hubungan normal antara Israel dan negara-negara Arab ketika Israel setuju untuk mundur sepenuhnya dari wilayah yang didudukinya sejak tahun 1967, mengakui negara Palestina merdeka, dan menerima solusi yang adil bagi permasalahan pengungsi Palestina (Mekelberg & Shapland, 2019).

Pada dasarnya, API merupakan kesepakatan komprehensif yang ditawarkan pada Israel oleh negara-negara Arab yang telah menyepakati bersama kesepakatan tersebut. Yasser Arafat sebagai perwakilan dari Otoritas Palestina menyetujui resolusi dari API tersebut. Namun dalam peranannya, API sebagai kesepakatan negosiasi baru terkait konflik Israel Palestina tidak mendapatkan sambutan baik dari Israel yang menolak resolusi perdamaian tersebut. Israel melalui PM Ariel Sharon yang tidak memiliki niat untuk melepaskan kontrol atau kendalinya dari wilayah Tepi Barat kemudian menolak resolusi damai tersebut (Smith C. D., 2017). Ariel Sharon memandang kesepakatan API sebagai paket permintaan yang tidak dapat dinegosiasikan kembali sehingga Israel tidak dapat menerima resolusi damai tersebut (Mekelberg & Shapland, 2019). Selain itu, pembahasan resolusi API dalam pertemuan Liga Arab tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan pertemuan tersebut dilakukan di tengah terjadinya Intifada kedua yang sarat akan adanya aksi-aksi kekerasan yang melingkupi wilayah Israel Palestina. Meskipun demikian, Liga Arab terus mendukung kembali resolusi API pada pertemuan Liga Arab yang diselenggarakan pada tahun 2007, 2013, dan 2017 (Mekelberg & Shapland, 2019).

2.1.2 Peran Global dalam Konflik Israel Palestina

Peran global dalam menangani konflik Israel dan Palestina yang masih hadir hingga kini tidak terlepas dari kehadiran Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang terlibat langsung dalam proses perdamaian konflik. Kontribusi Amerika Serikat untuk terlibat dalam proses damai pada konflik Israel Palestina secara umum dilakukan melalui dua cara yaitu: proses mediasi secara langsung dan keterlibatannya sebagai anggota tetap PBB. Pada dasarnya, keterlibatan Amerika Serikat untuk melakukan mediasi secara langsung telah dilakukan sejak dibentuknya Perjanjian *Camp David* tahun 1978 yang menandai berakhirnya perang antara Israel dan negara-negara Arab. Berakhirnya perang yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab tidak lantas menghentikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang kemudian membutuhkan perhatian dari Amerika Serikat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan Amerika Serikat dalam proses damai pada konflik Israel-Palestina terlihat pertama kali pada Kesepakatan Oslo I pada tahun 1993 yang kemudian dilanjutkan dengan Oslo II pada tahun 1995. Dibentuknya Kesepakatan Oslo I sejatinya dilandasi atas adanya pemberontakan Intifada selama enam tahun. Meskipun di dalam kesepakatan tersebut telah menghasilkan *Declaration of Principles on Interim Self Government Arrangement* yang memiliki 17 pasal dan 4 pasal tambahan, kondisi kawasan yang masih rawan dan dipenuhi konflik mendorong kesepakatan Oslo I belum mampu untuk meminimalisir permasalahan yang ada (Priambodo, 2018). Oleh karena itu, dibentuklah Kesepakatan Oslo II pada 28 September 1995 yang memiliki fokus utama pada pelebaran kekuasaan otonom Palestina. Atas adanya kesepakatan tersebut, Israel kemudian bersedia untuk mundur dari tujuh kota di wilayah Tepi Barat, yang terdiri dari: Qalqiyah, Tulkarem, Bethlehem, Nablus, Jenon, Ramallah, dan Hebron (Paat, 2013). Namun hingga Desember tahun 1995, Israel hanya menyerahkan enam kota awal di Tepi Barat, kecuali kota Hebron.

Selanjutnya, Amerika Serikat melakukan Perundingan Hebron pada tahun 1997 yang memiliki fokus utama untuk menarik pasukan Israel dari berbagai wilayah di Palestina, khususnya Tepi Barat. Perundingan kembali dilakukan pada tahun 1998

dan 1999 yang disebut dengan Perundingan Wye River I dan II yang sejatinya memuat mengenai keberlanjutan ketentuan dari kesepakatan Oslo dan protokol Hebron yang belum diimplementasikan secara tuntas (Paat, 2013). Selain itu, Perundingan Wye River II turut mengkaji isu mengenai penundaan kemerdekaan negara Palestina hingga bulan September tahun 2000 (Paat, 2013). Memasuki tahun 2000, dibentuk Perundingan Camp David II yang diprakarsai oleh Presiden Bill Clinton dalam membahas mengenai isu-isu sensitif pada konflik Israel-Palestina, seperti: isu pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, perbatasan Israel-Palestina, hingga isu terkait status kota Yerusalem (Paat, 2013). Tidak berhenti sampai disitu, Amerika Serikat kembali melakukan Konferensi Annapolis pada tahun 2007 yang bertempat di Maryland, AS dalam membahas mengenai proses damai Israel dan Palestina yang dikenal dengan sebutan *The Roadmap for Peace*. Konferensi tersebut memiliki agenda utama dalam membahas pendirian negara merdeka Palestina dan penentuan status final Yerusalem, isu pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, keamanan, pembagian sumber air, hingga isu perbatasan antara Israel dan Palestina (Paat, 2013).

Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Presiden Barack Obama melakukan upaya mediasi berikutnya terkait konflik Israel dan Palestina dengan melakukan mekanisme negosiasi secara langsung (*Direct Negotiations Between Israel and Palestinians*) melalui forum tripartit yang menghadirkan perwakilan dari Israel, Palestina, maupun Amerika Serikat sebagai mediator pada September tahun 2010 dalam membahas mengenai isu pembangunan pemukiman Yahudi. Upaya negosiasi Amerika Serikat berikutnya diinisiasi oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat, John Kerry yang dikenal dengan sebutan *The Kerry Talk* yang berlangsung pada tahun 2013 hingga 2014 yang menekankan pada isu pembebasan tahanan Palestina, isu pemukiman Israel, dan status final Palestina (Priambodo, 2018). Selanjutnya, Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan proposal damai Israel-Palestina pada bulan Januari tahun 2020 lalu yang disebutnya sebagai “Transaksi Abad Ini” (Muhamad, 2020). Beberapa ketentuan yang tercakup dalam proposal damai tersebut, antara lain: (i) Yerusalem akan menjadi ibukota

Israel dan Abu Dis dijadikan sebagai ibukota Palestina; (ii) Israel akan mempertahankan semua pemukiman di Tepi Barat dan lembah Yordan (iii) keamanan disekitar Sungai Yordan hingga Laut Mediterania akan dikendalikan oleh Israel; (iv) Palestina tidak akan diakui sebagai negara independen secara langsung dan baru akan diberikan dalam empat tahun ke depan; dan (v) Pengungsi Palestina dan kebutuhannya akan diizinkan kembali memasuki negara Palestina namun tidak diizinkan untuk memasuki Israel (Muhamad, 2020).

Meskipun berbagai upaya mediasi telah dilakukan Amerika Serikat, proses perdamaian yang menjadi tujuan utama pada konflik Israel-Palestina belum mampu tercapai secara efektif. Menurut Yossi Mekelberg dan Greg Shapland (2018) dalam artikelnya yang berjudul “*Israel-Palestinian Peacemaking: What Can We Learn From Previous Efforts?*” menyebutkan bahwa kegagalan upaya mediasi dan negosiasi yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dilandasi oleh tidak adanya komitmen dan kepercayaan yang dimiliki oleh Israel maupun Palestina dalam melakukan proses perdamaian bersama. Selain itu, artikel tersebut turut menekankan pada kegagalan Amerika Serikat untuk membuat ‘*red lines*’ secara jelas terkait isu tertentu yang dibicarakan dalam proses mediasi sebagai pihak ketiga, tidak diberikannya jaminan tujuan akan diraih dan tidak menyebutkan aktor yang bertanggungjawab dalam menjamin kesuksesan proses perdamaian dalam *The Roadmap for Peace*, serta tidak ada sanksi dan penghargaan yang dikenakan oleh administrasi Amerika Serikat kepada Israel dan Palestina dalam upayanya untuk meraih tujuan yang diinginkan (Mekelberg & Shapland, 2018). Artikel lain turut menyebutkan kegagalan proses mediasi dan negosiasi yang selama ini dilakukan pada konflik Israel dan Palestina dilatarbelakangi oleh kondisi Israel dan Palestina yang rawan konflik, khususnya paska kemenangan Hamas pada tahun 2006 yang mendorong Israel untuk bersikap lebih keras dan memberlakukan blokade ekonomi kepada Palestina serta penolakan Israel untuk membekukan pembangunan pemukiman Yahudi di sekitar wilayah Palestina (Paat, 2013).

Amerika Serikat turut memiliki andil yang besar dalam proses perdamaian pada konflik Israel dan Palestina melalui *platform* PBB. Pasalnya, Amerika Serikat

sebagai anggota tetap PBB memiliki kewenangan untuk melakukan veto terhadap Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB. Namun dalam peranannya, veto yang dilakukan Amerika Serikat di dalam tubuh PBB justru dipandang sebagai sikap yang bias terhadap Israel. Terhitung hingga tahun 2017, Amerika Serikat setidaknya telah mengeluarkan veto sebanyak 43 kali untuk melindungi Israel dari tekanan dunia internasional (The New Arab, 2017). Beberapa veto yang dilayangkan Amerika Serikat terhadap resolusi PBB secara umum membahas mengenai pembangunan pemukiman Yahudi, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Palestina, pengecaman serangan militer Israel di Gaza yang menyebabkan banyak warga sipil tewas dan kerusakan properti, hingga memveto draft Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dengan menyebut draft tersebut sebagai “penghinaan” terhadap Amerika Serikat (BBC Indonesia, 2017).

Tidak hanya terbatas pada berbagai veto yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Resolusi PBB, kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang cenderung lebih memihak Israel turut memberikan pandangan bahwa Amerika Serikat masih belum mampu untuk bersikap adil terkait konflik Israel-Palestina. Beberapa kecenderungan yang lebih memihak Israel dapat terlihat dari kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan mengumumkan akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem (BBC Indonesia, 2017); tidak lagi mengakui jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di wilayah Gaza, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Tepi Barat; serta tidak lagi mengakui Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan (Muhamad, 2020). Kebijakan tersebut sejatinya disebut lebih memihak kepada Israel karena telah melanggar berbagai Resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB, seperti: Resolusi MU PBB No. 181¹ dan Resolusi DK PBB No. 242² dan 338³ (Muhamad, 2020). Kebijakan Amerika Serikat

¹ Resolusi PBB yang memberikan rekomendasi terbaginya wilayah Palestina menjadi dua bagian yang dikenal dengan sebutan *UN Partition Plan* tahun 1947

² Resolusi PBB tahun 1967 yang menyerukan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah yang diduduki selama Perang Enam Hari tahun 1967

di bawah Presiden Donald Trump yang mengeluarkan proposal damai bulan Januari tahun 2020 lalu turut menjadi kontribusi Amerika Serikat yang cenderung berpihak pada Israel dengan menentukan status Yerusalem dijadikan sebagai ibukota Israel secara sepihak. Kebijakan Amerika Serikat yang seringkali melayangkan veto terhadap berbagai Resolusi PBB terkait dengan konflik Israel dan Palestina ditambah kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Trump kini yang lebih berpihak pada Israel justru menjadikan konflik tersebut semakin kompleks untuk diselesaikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Simela Victor Muhamad (2020) yang menyebutkan bahwa paska proposal damai AS diumumkan Trump maka bukan tidak mungkin konflik Israel-Palestina semakin jauh dari penyelesaian damai.

Aktor negara lain yang terlibat dalam konflik Israel Palestina adalah Norwegia. Norwegia disebut sebagai salah satu negara *peace nation* yang memiliki fokus dalam melakukan diplomasi perdamaian dalam upayanya untuk menciptakan perdamaian dunia (Skanland, 2010). Salah satu kontribusi yang mencerminkan peran Norwegia sebagai *peace nation* adalah keterlibatannya dalam menciptakan perdamaian pada konflik Israel Palestina. Keterlibatan Norwegia dalam konflik Israel Palestina dapat terlihat pada kontribusinya yang berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam menginisiasi perundingan awal sebelum dilakukannya Kesepakatan Oslo pada tahun 1993 terhadap Israel dan Palestina. Selain itu, Norwegia turut menginisiasi dibentuknya suatu komite atau grup bantuan internasional dalam memberikan bantuan dana kepada Palestina yang dikenal dengan sebutan Ad Hoc Liaison Committee (AHLIC) pada tahun 1993. Selanjutnya, kebijakan luar negeri Norwegia turut berorientasi pada konflik Israel Palestina yang mencerminkan identitas negaranya sebagai *peace nation* dalam menciptakan perdamaian dunia.

Pada dasarnya, sebelum dibentuknya Kesepakatan Oslo pada tahun 1993, Norwegia telah terlebih dahulu membentuk suatu perundingan antara Israel dan Palestina dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina. Insentif Norwegia dalam membentuk perundingan damai tersebut dilatarbelakangi oleh permintaan dari Yasser

³ Resolusi PBB tahun 1973 mengenai penghentian perang dan kegiatan militer serta menyerukan untuk dilakukan negosiasi yang berdasar pada Resolusi No. 242

Arafat selaku ketua PLO yang berupaya untuk mencari alternatif lain untuk dapat melakukan negosiasi kembali bersama Israel setelah sebelumnya pelaksanaan perundingan *Madrid Peace Conference* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pada tahun 1991 belum cukup efektif dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina (Agnes, 2019). Atas dasar tersebut, Norwegia kemudian memainkan perannya sebagai fasilitator dalam mengadakan suatu perundingan damai antara Israel dan Palestina yang berlangsung di Norwegia berdasarkan prinsip kerahasiaan (*secrecy*) dalam tujuannya untuk meminimalisir intervensi maupun publikasi dari pihak manapun selain dari kedua pihak yang bertikai. Perundingan tersebut berlangsung selama delapan bulan yang terbagi menjadi 14 sesi dimana pertemuan pertamanya dilangsungkan pada akhir bulan Januari pada tahun 1993 yang dihadiri oleh masing-masing delegasi dari Israel yang dihadiri oleh akademisi Dr. Yair Hirschfeld and Dr Ron Pundak; Palestina yang dihadiri oleh Ahmad Qurei atau Abu Ala selaku salah seorang pejabat PLO; maupun Jan Egeland, Terje Rød-Larsen, dan Mona Juul selaku wakil Menteri Luar Negeri beserta para diplomat yang mewakili Norwegia sebagai fasilitator (Shlaim, 2016).

Dalam melancarkan proses perundingan berikutnya, Norwegia, Israel, dan Palestina kemudian menyepakati suatu pedoman dalam keberlanjutan perundingan kedua negara yang dikenal dengan *Sarpsborg Declaration of Principles* (DoP) pada bulan Maret tahun 1993 yang mendasarkan prinsip perundingannya pada prinsip *back channel* atau pembatasan akses media dan *mutual recognition* yang menempatkan Israel dan Palestina pada posisi yang sama pada perundingan tersebut (Agnes, 2019). Namun pada bulan Mei tahun 1993, delegasi dari Israel justru melakukan revisi terhadap DoP secara sepihak yang kemudian dipandang oleh delegasi PLO sebagai suatu tindakan yang berupaya untuk mendominasi perundingan dimana substansi dari revisi DoP yang diajukan oleh Israel mengarah pada penentuan otonomi Israel terhadap Jalur Gaza dan Tepi Barat yang semakin menyudutkan Palestina (Agnes, 2019). Kondisi perundingan yang semakin bergejolak atas hal tersebut kemudian mendorong Norwegia untuk meningkatkan perannya sebagai mediator dalam tujuannya untuk menengahi perdebatan di antara kedua negara dengan mengutus

Johan Jørgen Holst selaku Menteri Luar Negeri Norwegia. Dalam melanjutkan proses perundingan, Holst kemudian melakukan kunjungan ke Israel pada bulan Juni tahun 1993 yang diikuti dengan kunjungannya ke Palestina satu bulan setelah kunjungannya ke Israel yang selanjutnya Holst mengadakan perundingan yang dihadiri oleh delegasi dari kedua negara di Halvorsbøle, Norwegia (Agnes, 2019). Proses perundingan yang telah berlangsung selama delapan bulan kemudian mencapai titik puncaknya ketika ditandatanganinya Kesepakatan Oslo pada tanggal 13 September tahun 1993 oleh Mahmoud Abbas dan Shimon Peres di Washington D.C, Amerika Serikat dengan tetap mempertahankan prinsip *mutual recognition* (Agnes, 2019).

Ketika Kesepakatan Oslo telah berhasil disepakati oleh Israel dan Palestina. Norwegia kemudian menginisiasi kembali dibentuknya AHLC sebagai suatu output dari Kesepakatan Oslo tersebut. AHLC merupakan suatu komite atau grup donor internasional yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1993 yang memiliki fokus utama untuk menangani berbagai dampak buruk konflik di Jalur Gaza dan Tepi Barat (Agnes, 2019). Cakupan aktivitas AHLC meliputi pemberian bantuan dana kepada para korban konflik serta melakukan observasi lokasi konflik yang diikuti dengan penyusunan laporan observasi yang nantinya akan dikirimkan oleh kedua negara yang sedang bertikai maupun anggota dari AHLC tersebut. Komite AHLC dipimpin oleh Norwegia yang diikuti dengan beberapa anggota yang mendorong terlaksananya program bantuan kemanusiaan kepada Palestina, yaitu: Palestina, Israel, Jepang, Yordania, Arab Saudi, Kanada, Mesir, Tunisia, Rusia, IMF, PBB, disertai Uni Eropa dan AS sebagai sponsor, dan Bank Dunia sebagai Sekretariat (Agnes, 2019). Dalam pelaksanaannya, Norwegia kembali membentuk lembaga *Palestinians Economic Council for Development and Construction (PECDAR)* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perkembangan kehidupan Palestina dengan memberikan bantuan dana sebesar US\$150 juta pada tahun 1993 dari total dana sekitar US\$ 2 milyar (Agnes, 2019).

Selain itu, Norwegia turut memberikan bantuan dana kepada para pengungsi Palestina sebesar US\$46,7 juta pada pertengahan tahun 1998 dimana seperempat dari total dana tersebut dialokasikan kepada *UN Relief and Work Agency for Palestine*

Refugees in the Near East (UNRWA). Pada akhir tahun 1998, Norwegia kembali memberikan bantuan dana sebesar lebih dari US\$ 221 juta kepada Palestina yang selanjutnya diikuti dengan janji Norwegia yang akan memberikan bantuan dana kepada Palestina selama lima tahun ke depan senilai US\$151,8 juta yang diperuntukkan bagi para pengungsi Palestina yang berada di kamp-kamp wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, maupun di negara sekitarnya (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 1999). Selanjutnya, Norwegia kembali memberikan bantuan dana sebesar US\$422 juta dalam jangka waktu dari tahun 2008 hingga 2010 yang ditujukan untuk proyek rekonstruksi infrastruktur Palestina melalui program *Road Safety Program* (Agnes, 2019). Norwegia kembali menunjukkan perhatiannya dalam konflik Israel Palestina ketika terjadi insiden *Gaza Crisis* atau *50 Days of War* pada tahun 2014 dengan memberikan bantuan dana sebesar US\$362,4 juta yang ditujukan kepada para korban dalam konflik tersebut (Agnes, 2019). Tidak hanya itu, Norwegia melalui organisasi nasionalnya, *Norwegian Church Aid* (NCA) yang bekerja sama dengan *Danish Church Aid* (DCA) turut memperjuangkan hak-hak Palestina dengan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan melalui program yang dikenal dengan *DCA-NCA Joint Country Programme* yang mendasarkan fokus aktivitasnya pada aspek *human resources, economic empowerment, active citizenship, dan international advocacy*. Melalui program tersebut, Norwegia telah memberikan total bantuan dana sebesar US\$ 1,5 milyar pada periode waktu dari tahun 2011 hingga 2016 (Agnes, 2019).

2.2 Dinamika Hubungan Turki dan Israel

Terjalinnnya hubungan bilateral antara kedua negara sejatinya tidak selalu menunjukkan hubungan yang stabil. Berkaca dari hal tersebut, Turki dan Israel merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Namun dalam peranannya, hubungan diplomatik diantara kedua negara tersebut tidak menunjukkan keadaan yang stabil secara permanen melainkan mengalami kondisi hubungan yang pasang surut sejak awal terbentuknya hubungan diplomatik hingga saat ini. Pada sub bab berikut akan dijelaskan mengenai dinamika hubungan diplomatik yang terjalin antara Turki dan Israel. Pembahasan pada sub bab berikut

akan memaparkan mengenai hubungan diplomatik antara kedua negara sejak awal pembentukannya, kedekatan hubungan antara keduanya, hingga merosotnya kedekatan di antara Turki dan Israel yang disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya terkait dengan adanya insiden kapal MV Mavi Marmara yang berujung pada dibekukannya hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral di antara keduanya. Selain itu, hubungan diplomatik yang dijalankan Turki bersama Israel juga akan dipaparkan pada sub bab berikut melalui 2 periode pemerintahan di Turki, yaitu pada masa sebelum Pemerintahan AKP menduduki pemerintahan dan pada masa saat Pemerintahan AKP menduduki pemerintahan di Turki.

2.2.1 Masa Sebelum Pemerintahan AKP

Terjalannya hubungan diplomatik antara Turki dan Israel pertama kali terbentuk ketika Turki di bawah Presiden Ismet İnönü mengakui kedaulatan Israel pada tanggal 28 Maret 1949. Pengakuan tersebut memberikan indikasi bahwa Turki menjadi negara dengan mayoritas penduduknya muslim pertama di kawasan Timur Tengah yang mengakui kedaulatan Israel setelah 10 bulan Israel menyatakan kemerdekaannya. Pada dasarnya, pengakuan Turki terhadap Israel turut dipengaruhi oleh politik luar negeri Turki yang cenderung pro-Barat. Dikarenakan politik luar negeri Turki yang lebih condong pada Barat, Turki kemudian mengikuti langkah negara-negara blok Barat dengan mengakui kedaulatan Israel yang secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap pengakuan negara-negara blok Barat terhadap eksistensi Turki. Setelah pengakuan tersebut, Turki dan Israel kemudian bersama-sama membangun kantor kedutaannya di masing-masing negara tujuan pada tahun 1950.

A. Bidang Politik

Hubungan diplomatik antara kedua negara mulai terbentuk dan dapat dikatakan berjalan secara baik-baik saja dan terkesan ‘dingin’. Artinya, terjalannya hubungan diplomatik antara Turki dan Israel pada mulanya merupakan hubungan yang dibina atas adanya pengaruh dari Barat (Ibrahim & Nor, 2019). Hubungan diplomatik yang terbentuk pada masa Perang Dingin tersebut memiliki fokus utama dalam membendung perluasan ideologi Komunisme dari pengaruh Uni Soviet di Asia

Barat. Namun dalam pelaksanaannya, hubungan diplomatik yang terjalin antara Turki dan Israel dapat dikatakan tidak selalu menunjukkan kestabilannya melainkan menunjukkan adanya hubungan yang pasang surut pada tahun 1950an hingga 1980an (Ibrahim & Nor, 2019).

Kestabilan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel mulai mengalami ketegangan atas adanya krisis konflik Terusan Suez pada tahun 1956. Ketika Mesir melakukan nasionalisasi terhadap Terusan Suez yang berakibat pada terhalangnya Israel dalam melakukan pelayaran laut, Israel kemudian merespon aksi Mesir dengan mengerahkan pasukan-pasukan militernya ke Jalur Gaza hingga ke Tepi Timur Terusan Suez. Hadirnya pasukan militer Israel di Jalur Gaza yang menjadi otonomi wilayah Palestina secara langsung berpengaruh terhadap perlakuan Israel kepada rakyat Palestina yang mendiami wilayah tersebut. Atas dasar tersebut, Turki kemudian menurunkan level diplomatiknya menjadi *Charge d' Affaires* terhadap Israel (Fadel, 2018). Namun, keadaan mulai membaik kembali ketika Israel melalui Perdana Menteri, David Ben Gurion melakukan kunjungan ke Ankara untuk menemui Adnan Menderes selaku Perdana Menteri Turki pada tahun 1958. Pertemuan secara rahasia tersebut menghasilkan suatu Pakta Periperal yang menekankan pada dibangunnya hubungan kerjasama diantara kedua negara dalam bidang militer dan ekonomi (Gökçe, 2012). Menurut Shira Efron (2018) dalam artikelnya yang berjudul "*The Future of Israeli-Turkish Relations*" menyebutkan bahwa pertemuan secara rahasia yang dilakukan oleh PM David Ben Gurion dan PM Adnan Menderes sejatinya dilakukan untuk membentuk dasar kesepakatan kerjasama antara Israel dan Turki yang terbentuk melalui Pakta Periperal yang di dalamnya berisi mengenai pembahasan pertukaran informasi intelijen dan militer yang dimiliki keduanya dalam tujuannya untuk memperkuat sektor militer dari kedua negara. Dengan kata lain, pertemuan secara rahasia yang membentuk Pakta Periperal tersebut menjadi basis dasar bagi Turki dan Israel dalam membentuk kerjasama dalam sektor militer yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai perjanjian militer yang terbentuk pada tahun 1990an. Selain itu, pertemuan tersebut telah

memainkan peranan yang krusial bagi hubungan bilateral antara Turki dan Israel di masa mendatang.

Tidak berlangsung lama setelah pertemuan tersebut, hubungan Turki dan Israel mulai surut kembali atas adanya isu Siprus pada tahun 1960an. Pada saat itu, Israel yang telah menjalin hubungan dekat dengan Turki justru lebih memilih untuk mendukung etnis Siprus Yunani di dalam konflik Siprus yang juga melibatkan Turki (Gökçe, 2012). Atas aksi Israel tersebut, Turki kemudian mencari dukungan dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara Arab ketika Turki gagal dalam mendapatkan dukungan internasional, khususnya negara-negara blok Barat. Kondisi semakin diperparah ketika terjadi Perang Enam Hari pada tahun 1967 yang berujung pada kemenangan Israel terhadap negara-negara Arab. Perluasan wilayah Israel atas kemenangannya pada perang tersebut telah berimplikasi pada didudukinya wilayah Palestina oleh Israel. Hal ini dikarenakan, kemenangan Israel atas Perang Enam Hari pada tahun 1967 memberikan kekuasaan bagi Israel untuk memperluas wilayah teritorialnya sebesar 200 persen yang meliputi: kepemilikan Dataran Tinggi Golan, wilayah Tepi Barat dari Sungai Yordania, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai, yang di dalamnya termasuk wilayah Tepi Timur dari Terusan Suez (Gökçe, 2012). Atas adanya pendudukan di beberapa wilayah tersebut, Turki bersama negara-negara Arab mendesak Israel untuk mundur dari wilayah yang didudukinya selama perang yang sesuai dengan Resolusi DK PBB No. 242. Pendudukan Israel terhadap Pelestina turut memunculkan banyak kecaman dari negara-negara Arab. Berbeda dengan negara-negara Arab yang turut melontarkan pernyataan kasar terhadap pendudukan Israel dengan menyebutnya sebagai “negara agresor”, Turki lebih memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kasar maupun memberikan sanksi terhadap Israel. Bahkan, meskipun simpati Turki terhadap Israel telah bergeser, Turki tetap memilih untuk bersikap *abstain* dalam merespon tindakan Israel terhadap Palestina. Buktinya, Turki tidak berpartisipasi pada setiap resolusi yang dikeluarkan dalam keanggotaannya pada Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang terkait dengan mengutuk aksi-aksi Israel terhadap Palestina (Gökçe, 2012). Sikap Turki yang memilih untuk *abstain* dan menahan diri dalam menyikapi tindakan Israel yang

menduduki beberapa wilayah di kawasan Timur Tengah didasari atas politik luar negeri Turki yang pada masa itu lebih condong mengarah ke Barat. Keinginan Turki untuk dapat menjadi bagian dari Barat menuntunnya untuk melakukan langkah-langkah yang dapat membuat eksistensinya diakui oleh Barat. Alhasil, sikap Turki yang memilih untuk tidak memberikan respon apapun terhadap tindakan Israel mendapatkan nilai prestis di mata Barat dimana Turki telah terbukti dapat menjadi rekan Israel yang dapat diandalkan di kawasan Timur Tengah (Gökçe, 2012).

Politik Luar Negeri Turki pada tahun 1970an mulai menunjukkan arah politiknya yang pro terhadap Arab dan Palestina yang terwujud dalam pengakuan Turki atas *Palestine Liberation Organization* (PLO) pada tahun 1974 sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina dan dilanjutkan dengan keputusan Turki untuk mengizinkan PLO membuka kantornya di Ankara pada tahun 1979 telah berimplikasi pada menurunnya hubungan diplomatik Turki bersama Israel (Fadel, 2018). Tidak berhenti sampai disitu, hubungan antara Turki dan Israel mulai menunjukkan ketegangannya kembali ketika Israel mendeklarasikan penyatuan Yerussalem sebagai ibukota Israel pada tahun 1980 yang dikenal dengan sebutan *Jerusalem Act* (Fadel, 2018). Dalam merespon hal tersebut, Turki kemudian memutuskan untuk menurunkan level diplomatiknya terhadap Israel menjadi *Second Secretary* serta menutup Konsulat Jenderal Turki di Yerussalem (Gökçe, 2012). Respon Turki tersebut mengindikasikan bahwa hubungan diplomatik Turki dan Israel mencapai titik terendahnya pada masa Perang Dingin meskipun hubungan diplomatik di antara keduanya masih tetap berjalan.

Dalam pelaksanaannya, kondisi titik terendah dalam hubungan diplomatik Turki dan Israel mulai menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik ketika memasuki tahun 1990an, khususnya pada tahun 1991 yang menjadi penanda awal dimulainya normalisasi kembali hubungan diplomatik antara keduanya. Hal ini didasari atas adanya keputusan dari Presiden Süleyman Demirel dari Turki yang memutuskan untuk mengembalikan hubungan diplomatik bersama Israel yang dimulai dengan meningkatkan level diplomatiknya menjadi level *Ambassadorial* pada bulan Desember 1991 (Gökçe, 2012). Selain itu, pada tahun yang sama, Presiden

Demirel turut membuka dan mengaktifkan kembali kantor Konsulat Jenderal Turki yang berada di Yerusalem (Gökçe, 2012).

B. Bidang Militer dan Pertahanan

Kesepakatan antara Turki dan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik kembali terwujud dalam kunjungan Perdana Menteri Turki, Tansu Çiller pada tahun 1994. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Turki ke Israel yang menjadi bukti kuat yang dapat mengarahkan hubungan yang lebih positif diantara Turki dan Israel setelah memburuknya hubungan antara keduanya pada masa Perang Dingin (Gökçe, 2012). Kunjungan tersebut sejatinya membahas mengenai peningkatan kerjasama keamanan sebelum pada akhirnya terbentuk beberapa perjanjian kerjasama dalam bidang industri pertahanan, militer, ekonomi, dan pariwisata pada tahun 1996 atas adanya kunjungan Presiden Israel, Ezer Weizman ke Ankara (Erdurmaz, 2012).

Terbentuknya kerjasama dalam bidang industri pertahanan sejatinya dilatar belakangi oleh keinginan Turki untuk melakukan modernisasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur industri pertahanannya paska Perang Dingin yang dapat membantunya untuk membangun kekuatan konvensional yang memadai (Erdurmaz, 2012). Kerjasama yang difokuskan pada industri pertahanan tersebut terimplementasikan oleh adanya penandatanganan kesepakatan kerjasama industri pertahanan yang dikenal dengan *Defense Industry Cooperation Agreement (DICA)*. Dalam peranannya, cakupan yang menjadi bagian kegiatan di dalam kerjasama pertahanan tersebut, meliputi: dilakukannya transfer teknologi antara Turki dan Israel dan *joint-production* yang ditujukan kepada para teknisi dan peneliti Turki dalam tujuannya untuk mengedukasi teknisi yang nantinya dapat membangun infrastruktur produksinya secara mandiri (Erdurmaz, 2012). Dalam merealisasikan kerjasama tersebut, Turki dan Israel kemudian menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam bidang persenjataan militer dengan memproduksi rudal Popeye II secara bersama (Gökçe, 2012). Selain itu, kerjasama dalam bidang industri pertahanan tersebut turut berkontribusi terhadap dilakukannya modernisasi pesawat jenis F-4 dan F-5 *Phantom fighter* milik Turki oleh Industri Pertahanan Israel (Gökçe, 2012).

Kerjasama Militer yang dilakukan Turki dan Israel pada tahun 1996 turut menjadi contoh lain menguatnya hubungan diplomatik antara keduanya dengan dibentuknya kerangka kerjasama keamanan melalui *the Military Training and Cooperation Agreement* (MTCA). Kerangka kerjasama MTCA tersebut menekankan pada dilakukannya kerjasama-kerjasama militer di antara kedua negara, yang meliputi kegiatan seperti: kunjungan militer bersama, pelatihan militer bersama dan pelatihan terbang angkatan udara bersama yang dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, pertukaran informasi intelijen, serta dilakukannya pertemuan dialog strategis yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dengan menghadirkan pejabat-pejabat yang terkait dengan urusan keamanan dan politik luar negeri dari masing-masing negara (Gökçe, 2012). Tidak berhenti sampai disitu, penguatan hubungan strategis antara Turki dan Israel menjadi nyata ketika dilakukannya pelatihan militer untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Pelatihan tersebut dikenal dengan sebutan Operasi *Reliant Mermaid* yang melangsungkan pelatihan militer di lepas pantai Israel yang turut dihadiri oleh militer Amerika Serikat (Gökçe, 2012). Pelatihan tersebut kembali digalakkan dengan nama Operasi *Reliant Mermaid II* pada tahun 1999 yang bertempat di lepas pantai Turki (Gökçe, 2012). Operasi *Reliant Mermaid* merupakan suatu inisiatif untuk memperkuat kerjasama dalam bidang militer yang direalisasikan dalam bentuk latihan militer bersama yang dilakukan oleh Turki, Israel, dan Amerika Serikat di sekitar laut Mediterania. Operasi tersebut dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dalam tujuannya untuk melatih pasukan dalam misi penyelamatan darurat dengan berdasar pada prosedur *Search and Rescue* dengan dilengkapi koordinasi masing-masing kapal dari ketiga negara (Babaoglu, 2005). Menurut laporan lain yang diunggah dalam laman berita *navaltoday.com* menyebutkan bahwa Operasi *Reliant Mermaid* merupakan suatu kerangka latihan bersama yang dilakukan secara rutin sebanyak dua kali dalam setahun dan tidak memiliki kaitan apapun pada fenomena-fenomena yang berhubungan dengan situasi global (navaltoday.com, 2018). Hal Ini mengindikasikan bahwa latihan ini merupakan suatu kerangka koordinasi latihan bersama dalam sektor militer yang dilakukan oleh Turki, Israel,

dan Amerika Serikat dalam tujuannya untuk memperkuat kerjasama dalam menciptakan perdamaian tanpa melibatkan adanya suatu fenomena apapun.

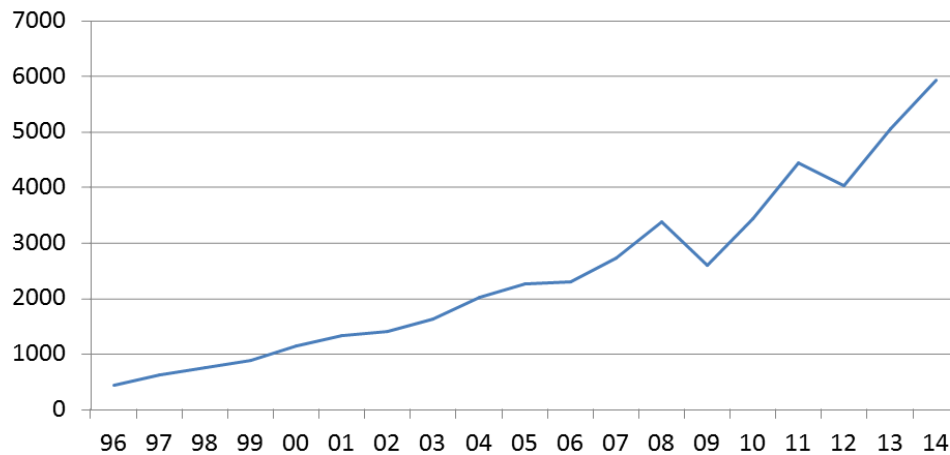
C. Bidang Ekonomi

Sektor ekonomi dan pariwisata turut berkontribusi dalam terbentuknya kerjasama bilateral antara Turki dan Israel. Paska dibentuknya hubungan diplomatik bersama pada tahun 1950, Turki dan Israel menandatangani suatu perjanjian perdagangan yang dikenal dengan kesepakatan *Trade and Payment Agreement* dalam tujuannya untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pada kerjasama bilateral tersebut Turki menjadi negara pengimpor bahan-bahan pertanian dan bahan pangan lainnya bagi Israel mengingat Israel yang baru saja merdeka dan masih kekurangan bahan-bahan penting tersebut (Athanasopoulou, 2017). Namun, kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi tersebut tidak dapat bertahan lama akibat munculnya krisis politik akibat Perang Terusan Suez pada tahun 1956 yang melibatkan Israel. Kerjasama bilateral Turki dan Israel di bidang ekonomi sejatinya masih sangat dipengaruhi oleh hubungan politik yang terjadi antara kedua negara. Dengan kata lain, kerjasama bilateral pada sektor ekonomi antara Israel dan Turki di bawah pemerintahan sebelum AKP sangatlah bergantung pada keadaan politik yang tengah terjadi diantara kedua negara maupun di kawasan. Hal ini terlihat ketika terjadinya krisis politik pada Perang Terusan Suez tahun 1956 dan saat terjadinya krisis minyak pada tahun 1970an yang telah mendorong hubungan perdagangan keduanya mulai menurun bahkan hampir terputus dimana presentase nilai ekspor Turki ke Israel hanya berkisar di angka 0,4% pada tahun 1981 (Punsmann, 2011). Hal ini menjadikan kerjasama bilateral pada bidang ekonomi antara Turki dan Israel menjadi sangat terbatas, terutama dari awal pembentukan hubungan diplomatik hingga memasuki tahun 1990an.

Keadaan mulai berubah kembali ketika hubungan politik antara Turki dan Israel mulai membaik dengan dikirimkannya perwakilan ambassador ke Tel Aviv pada tahun 1986. Atas hubungan politik kedua negara yang mulai membaik, hubungan perdagangan keduanya pun mulai kembali berkembang pada tahun 1990an dengan dibangunnya beberapa kerjasama pada bidang ekonomi melalui Pakta

Peripheral. Kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi yang terjalin antara Turki dan Israel terbentuk melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*) tahun 1996, Perjanjian dalam Mencegah Pajak Ganda tahun 1996, dan Perjanjian Investasi Bersama tahun 1996 (Gökçe, 2012). Meskipun ketiga perjanjian tersebut terbentuk dan ditandatangani pada tahun 1996, ketiga perjanjian tersebut baru mulai berjalan secara efektif satu tahun setelahnya. Volume perdagangan antara Turki dan Israel kemudian mulai menunjukkan peningkatan secara pesat sejak diberlakukannya Perjanjian Perdagangan Bebas pada tahun 1997. Peningkatan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut melalui grafik berikut.

Grafik 2.1
Total Volume Perdagangan Turki-Israel
(Dalam Juta \$)



Sumber: Osman Eroglu, İslam Altun, Mustafa Altun. (2016). The Political Crisis in Turkey-Israel Relations and Economic Interdependance. *Proceedings of 37th International Business Research Conference*.

Berdasarkan grafik 2.1 dapat terlihat kurva total volume perdagangan luar negeri antara Turki dan Israel yang menunjukkan peningkatan secara signifikan mulai tahun 1996 hingga tahun 2002. Volume perdagangan kedua negara yang meningkat secara signifikan tersebut sejalan dengan mulai diberlakukannya Perjanjian Perdagangan Bebas pada tahun 1997 yang menjadi basis dasar terjalinnya hubungan

perdagangan bilateral di antara kedua negara (Güllü & Yazıcı, 2016). Hal ini terlihat ketika pada awal pembentukan perjanjian tersebut tahun 1996 volume perdagangan bilateral kedua negara hanya berkisar di angka \$449 juta dan kemudian mengalami lonjakan di angka \$1,2 milyar pada tahun 2002 (Eroglu, Altun, & Altun, 2016). Secara umum, produk yang diekspor Turki ke Israel berupa produk logam dan baja, tekstil, bahan-bahan kimia, plastik, bahan bangunan, dan produk otomotif ataupun transportasi lainnya sedangkan Israel mengekspor produk-produk, seperti bahan kimia, produk pertanian, plastik, dan teknologi ke Turki (Punsmann, 2011).

Selain itu, Perjanjian Pariwisata tahun 1992 turut menjadi contoh lain menguatnya hubungan diplomatik antara Turki dan Israel dimana pada tahun 1993 terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari Israel ke Turki yang meningkat dari angka 40.000 menjadi 400.000 wisatawan (Gökçe, 2012). Dilakukannya normalisasi hubungan antara Turki dan Israel pada tahun 1991 yang diikuti dengan terbentuknya beberapa kerjasama secara intensif menunjukkan bahwa hubungan diplomatik antara Turki dan Israel mencapai titik tertingginya selama menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Kedekatan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel pada tahun 1990an, khususnya pada tahun 1991-1996 bahkan disebut-sebut sebagai “tahun emas” bagi kedua negara tersebut (Gökçe, 2012).

2.2.2 Masa Saat Pemerintahan AKP

Kemenangan Partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi* atau Partai Keadilan dan Pembangunan) yang memperoleh 34,20% suara dalam pemilihan umum telah mendorongnya untuk memperoleh kursi kepala negara, kepala pemerintahan, dan parlemen sebanyak 363 dari total 550 kursi yang ada (Gökçe, 2012). Kemenangan tersebut secara eksplisit turut memberikan pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik Turki dan Israel yang telah terjalin sejak lama. Pasalnya, Partai AKP merupakan partai demokrat konservatif dan diwaktu yang sama turut mencerminkan partai pro-Islam. Hal ini kemudian mendorong kekhawatiran bagi Israel dalam menjalin hubungan diplomatik bersama Turki yang sebelumnya dikuasai oleh partai sekuler kemudian berubah menjadi partai yang turut mengembalikan identitas Islam. Dalam pelaksanaannya, hubungan diplomatik yang terjalin di antara Turki dan Israel

di bawah Pemerintahan Abdullah Güll dan Erdoğan memang cenderung menunjukkan dinamika yang tidak stabil.

A. Bidang Politik

Pada paruh awal Pemerintahan AKP memerintah, hubungan diplomatik Turki dan Israel masih menunjukkan hubungan yang stabil dimana kedua pemimpin negara masih melakukan kunjungan ke masing-masing negara tujuan. Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdoğan yang melakukan kunjungan resmi ke Israel pada tahun 2005 kemudian disambut baik oleh Israel dengan melakukan kunjungan balik dari Presiden Shimon Peres dan Perdana Menteri Ehud Olmert pada tahun 2007 dan 2008 (Ibrahim & Nor, 2019). Bahkan, kerjasama dalam bidang ekonomi perdagangan, industri pertahanan, dan militer dengan dilakukannya pelatihan militer masih tetap digalakkan pada tahun 2003 hingga 2004 (Ibrahim & Nor, 2019). Turki yang turut berkontribusi menjadi pihak ketiga dalam memediasi konflik antara Israel dan Suriah pada tahun 2008 turut menjadi bukti nyata bahwa hubungan yang terjalin antara Turki dan Israel masih menunjukkan kedekatan dan kestabilannya.

Namun keadaan mulai berubah ketika Israel justru melakukan aksi-aksi penyerangan yang ditunjukkan pada masyarakat Palestina di Jalur Gaza pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009. Aksi penyerangan tersebut dimulai ketika Israel melancarkan Operasi *Cast Lead* yang bertujuan untuk menghentikan serangan roket dari Hamas maupun pejuang Palestina lainnya. Aksi penyerangan Israel tersebut telah mendorong timbulnya korban jiwa sebanyak 1400 jiwa yang diikuti dengan adanya kerusakan dan krisis kemanusiaan di sekitar Jalur Gaza (Erdurmaz, 2012). Insiden penyerangan tersebut sontak memberikan pukulan keras bagi dunia internasional, khususnya negara-negara Arab dan Turki yang mengecam tindakan Israel dalam melakukan penyerangan di Jalur Gaza. Erdoğan kemudian melayangkan kritik terhadap aksi penyerangan Israel dengan menyebut Israel sebagai “hipokrit” yang di satu sisi seringkali membicarakan persoalan keamanan sebagai agenda utama namun di waktu yang sama turut berkontribusi dalam melakukan “pembunuhan terhadap anak-anak” (Ibrahim & Nor, 2019).

Tidak berhenti sampai disitu, kondisi ketegangan mengalami eskalasi atas adanya insiden penyerangan kapal MV Mavi Marmara oleh Israel pada tahun 2010 yang turut menjadi titik utama merenggangnya hubungan Turki dan Israel yang berujung pada dibekukannya kerjasama pelatihan militer dan diputusnya hubungan diplomatik. Insiden penyerangan kapal MV Mavi Marmara dimulai ketika Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki atau *Ihsani Yardim Vakfi* (IHH) sebagai salah satu organisasi non-pemerintah di Turki melakukan kerjasama dengan *Freedom Flotilla* dalam melakukan misinya untuk memecahkan blokade Israel di Jalur Gaza dan meningkatkan kesadaran negara-negara di dunia internasional atas adanya isu Palestina melalui perjalanan pelayaran dengan menggunakan 6 kapal pada Mei 2010 (Ibrahim & Nor, 2019). Blokade yang diterapkan Israel di Jalur Gaza merupakan respon Israel terhadap kemenangan organisasi Hamas pada pemilu tahun 2006. Kemenangan Hamas tersebut telah mendorong Israel untuk memperketat pengawasan di perairan Gaza yang kemudian berimplikasi pada sulitnya memasukkan bantuan kemanusiaan luar negeri ke Palestina melalui Jalur Gaza (Ibrahim & Nor, 2019). Pelayaran kapal MV Mavi Marmara yang turut membawa bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina pada bulan Mei tahun 2010 mengalami hambatan ketika perjalanan pelayaran tersebut diserang oleh Angkatan Militer Laut Israel atau *Israel Defense Force* (IDF) yang masih berada di wilayah perairan internasional dimana aksi penyerangan tersebut menyebabkan 9 aktivis Turki pro-Palestina tewas (Erdurmaz, 2012). Atas dasar tersebut, Turki kemudian membekukan kerjasama pelatihan militer bersama Israel, menarik Duta Besar Turki di Tel Aviv, mengusir Duta Besar Israel di Ankara, dan memutus hubungan diplomatiknya bersama Israel (Erdurmaz, 2012). Selain itu, Turki turut mengeluarkan tuntutan terhadap Israel atas penyerangan kapal MV Mavi Marmara yang menewaskan 9 aktivis Turki ke dalam 3 tuntutan utama, yaitu: (i) permohonan maaf secara resmi dari otoritas Israel; (ii) pemberian kompensasi terhadap korban penyerangan kapal MV Mavi Marmara; dan (iii) menghentikan blokade di Jalur Gaza dalam tujuannya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan (Ibrahim & Nor, 2019).

Terputusnya hubungan diplomatik antara Turki dan Israel yang diikuti dengan dibekukannya kerjasama militer diantara keduanya berlangsung selama 3 tahun. Adanya desakan AS yang mendesak Israel untuk memenuhi ketiga tuntutan Turki mengarah pada pemenuhan tuntutan pertama Turki oleh Israel dimana pada tahun 2013, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan permintaan maafnya secara resmi kepada Turki (Ibrahim & Nor, 2019). Selanjutnya, hubungan antara Turki dan Israel mulai menunjukkan hubungan yang kembali baik ketika kedua negara melakukan pertemuan tertutup dalam membahas normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 2015. Namun dalam peranannya, kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Turki dan Israel secara resmi terealisasi pada tahun 2016 yang ditandai dengan kesediaan Turki mencabut segala tuntutan terhadap angkatan militer laut Israel atau *Israel Defense Force (IDF)* yang terlibat dalam penyerangan kapal Mavi Marmara, pembayaran kompensasi Israel terhadap para korban sebesar \$20 juta, dan diperbolehkannya bantuan kemanusiaan Turki yang ditujukan kepada Palestina untuk masuk ke Jalur Gaza oleh Israel (Myers, 2017). Penempatan masing-masing duta besar di masing-masing negara turut dilakukan di tahun yang sama sebagai bentuk pemulihan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel yang telah terputus selama 6 tahun (Myers, 2017).

Meskipun hubungan diplomatik antara Turki dan Israel mulai terjalin kembali sejak tahun 2016, dinamika hubungan diplomatik di antara keduanya masih mengalami pasang surut. Turki di bawah Pemerintahan AKP dan Erdoğan yang terus menunjukkan dukungannya pada rakyat Palestina dan kelompok Hamas mendorong hubungannya bersama Israel menjadi renggang dan kembali “dingin”. Tak jarang Erdoğan dan Benjamin Netanyahu juga terlibat dalam “perang kata-kata” dimana Erdoğan melayangkan kecaman terhadap otoritas Israel terkait dengan pendudukan dan penyerangan terhadap warga Palestina yang dibalas dengan kecaman atau pernyataan keras lainnya dari pihak Israel. Hal tersebut terealisasi dari pernyataan Erdoğan yang menyebut Netanyahu sebagai seorang “pelaku pendudukan,” “seorang teroris,” dan menyamakan Israel dengan rezim Nazi yang menyatakan bahwa “Langkah ini memperlihatkan, tanpa sedikitpun keraguan, bahwa Israel adalah negara

paling Zionis, fasis dan rasis di dunia. Tidak ada perbedaan antara obsesi Hitler terhadap ras Arya dengan pemahaman Israel bahwa tanah kuno ini hanyalah untuk warga Yahudi. Semangat Hitler, yang menyebabkan terjadinya bencana besar dunia, bangkit kembali di antara sebagian pemimpin Israel” (BBC Indonesia, 2018). Atas adanya pernyataan Erdoğan tersebut, Israel menunjukkan kemarahannya dengan melayangkan pernyataan balasan yang mengatakan bahwa, “Turki di bawah Erdoğan menjadi kediktatoran kelam” dan menuduh Erdoğan "membantai warga Suriah dan Kurdi serta memenjarakan puluhan ribu warganya" (BBC Indonesia, 2018). Tidak hanya itu, keputusan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerussalem sebagai iukota Israel pada tahun 2017 telah memunculkan banyak kecaman dari dunia internasional, tak terkecuali Turki. Dalam merespon keputusan Trump, Erdoğan bahkan tidak ragu untuk memutuskan hubungan diplomatik bersama Israel bila keputusan tersebut benar-benar terealisasikan (VOA Indonesia, 2017).

B. Bidang Militer dan Pertahanan

Pada dasarnya, hubungan diplomatik yang terjalin antara Turki dan Israel pada bidang militer dan pertahanan di bawah Pemerintahan AKP masih berjalan mengikuti beberapa kesepakatan pertahanan yang sebelumnya dibentuk pada tahun 1996. Penguatan hubungan bilateral pada bidang pertahanan di antara kedua negara sejatinya dilakukan melalui mekanisme dialog strategis (*strategic dialogue*) yang pertama kali dilakukan pada tahun 1997. Mekanisme dialog strategis tersebut memanfaatkan dilakukannya dua pertemuan sebagai *platform* dalam menguatkan hubungan bilateral pada bidang ini yang terbagi ke dalam pertemuan yang membahas bidang militer dan pertemuan lainnya yang membahas kerjasama pada industri pertahanan kedua negara (Berelovich, 2014).

Pada paruh awal Pemerintahan AKP, hubungan bilateral antara Turki dan Israel di bidang militer dan pertahanan masih terjalin dengan baik. Hal ini terlihat ketika PM Erdoğan melakukan kunjungan secara resmi ke Israel pada tanggal 1-2 Mei 2005. Beberapa kesepakatan dalam bidang industri pertahanan untuk memodernisasi alat persenjataan Turki kepada Israel terbentuk selama kunjungan tersebut (Berelovich, 2014). Pada dasarnya, kerjasama pada bidang industri

pertahanan antara Turki dan Israel dilatarbelakangi oleh keinginan Turki untuk dapat memodernisasi dan memodifikasi alat persenjataan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Israel merupakan salah satu mitra kerjasama Turki untuk dapat memenuhi keinginannya dalam memodernisasi persenjataan di bidang industri pertahanannya melalui beberapa perusahaan industri pertahanannya yang menjadi pelaku utama penerima tender untuk kebutuhan militer bagi Israel sendiri maupun perusahaan yang seringkali memenangkan kontrak penjualan senjata bagi angkatan bersenjata Turki (*Turkish Armed Forces - TSK*) (Handayani A. P., 2012). *Israel Aerospace Industries (IAI)*, *Israel Military Industries (IMI)*, Rafael and Elta merupakan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan di Israel yang menjadi aktor kerjasama dalam produksi alat persenjataan bersama Turki dan menjadi salah satu penerima tender dalam pengadaan alat persenjataan bagi Turki.

Kunjungan PM Erdoğan ke Israel pada bulan Mei 2005 menghasilkan kesepakatan untuk melakukan produksi 10 pesawat tanpa awak serta peralatan pengintaian bagi militer Turki oleh perusahaan IAI dan Elbit Systems Israel senilai \$183 juta (Handayani A. P., 2012). Turki melalui *Turkish Land Force Command* turut melakukan pembaharuan atau modernisasi terhadap tank jenis M-60 yang dimilikinya sejumlah 170 tank oleh perusahaan Israel, IMI yang memakan biaya sebesar \$700 juta pada tahun 2002 lalu setelah sebelumnya kesepakatan tersebut sempat terhenti pada tahun 2001 (Kogan, 2005). Selain itu, TSK turut bekerjasama dengan IMI untuk melengkapi helikopter militernya dengan menggunakan sistem peperangan elektronik dan sistem *chaff-flare dispensers* dengan total senilai \$167 juta (Kogan, 2005). Tidak hanya itu, *Turkish Aerospace Industries (TAI)* turut membuat kontrak dengan perusahaan Israel, Elbit Systems dalam memperbaharui helikopter jenis Sikorsky S-70 Blackhawk milik *Turkish Armed Forces Command (TAFC)* senilai \$14 juta (Kogan, 2005). Kerjasama dalam sektor latihan militer bersama kembali digalakkan oleh kedua negara ditambah Amerika Serikat yang dikenal dengan Operasi *Reliant Mermaid* yang dilangsungkan pada tanggal 17-21 Agustus 2009 dengan melibatkan sebanyak 8 kapal perang, 4 helikopter, dan 3 pesawat udara dalam operasi penyelamatan tersebut (Handayani A. P., 2012).

Namun, kerjasama dalam bidang militer dan pertahanan antara Turki dan Israel mulai terkendala pada paruh kedua pemerintahan AKP. Adapun terkendalanya kerjasama kedua negara disebabkan oleh adanya isu yang berkaitan dengan Palestina, seperti: Operasi *Cast Lead* tahun 2008, insiden PM Erdoğan yang *walkout* pada Forum Ekonomi Dunia di Davos tahun 2009, hingga terjadinya insiden penyerangan kapal Mavi Marmara tahun 2010 sebagai puncak meregangnya hubungan diplomatik kedua negara. Segala kesepakatan dan kerjasama pada bidang militer yang telah disepakati sebelumnya kemudian ditanggihkan oleh Turki yang mengarah pada terhentinya kerjasama pada bidang militer oleh kedua negara paska Turki memutuskan hubungan diplomatiknya bersama Israel akibat insiden penyerangan kapal Mavi Marmara pada tahun 2010 yang menewaskan 9 aktivis Turki pro-Palestina. Menurut Amalia Putri Handayani (2012), dalam artikelnya yang berjudul “Kebijakan Turki Memutuskan Kerjasama Militer dengan Israel Tahun 2010” menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 16 kesepakatan yang ditanggihkan oleh Turki dalam hal jual beli senjata bersama Israel yang nilainya diperkirakan mencapai \$56 milyar, yang meliputi proyek perbaikan tank, pesawat tempur, peluru kendali, dan lain sebagainya. Selain itu, kontrak untuk mendatangkan 1.000 tank tempur Merkava Mark III rancangan Israel senilai \$5 milyar, pembelian dua pesawat patroli Israel, sebuah jet sistem peringatan dan kontrol udara, serta kerjasama transfer teknologi tank M-60 menjadi bagian dari 16 kesepakatan yang dibekukan oleh Turki (Handayani A. P., 2012). Kerjasama dalam pertukaran informasi intelijen antara Turki dan Israel yang menjadi bagian dari kesepakatan MTCA turut dibekukan oleh Turki.

Tidak hanya itu, Turki turut melarang penggunaan wilayah udaranya untuk digunakan sebagai latihan gabungan udara yang sebelumnya telah dilakukannya bersama Israel dalam kerjasama militer. Hal ini terlihat ketika Turki menolak dan melarang pesawat AU Israel yang akan menuju Polandia untuk melewati wilayah udara Turki (Handayani A. P., 2012). Namun, larangan untuk melintasi wilayah udara Turki tidak berlaku untuk penerbangan sipil Israel. Artinya, penerbangan sipil dari Israel yang sekadar melintasi wilayah Turki atau dengan tujuan akhir Turki menjadi

kasus yang diizinkan oleh Turki terhadap Israel (Handayani A. P., 2012). Wilayah udara Turki yang luas sejatinya sangat dimanfaatkan oleh Israel untuk melakukan latihan militer gabungan. Namun, paska adanya larangan untuk melintasi maupun melakukan latihan militer gabungan di wilayah udara Turki cenderung membuat Israel kesulitan akibat kehilangan akses wilayah udara Turki yang luas dan strategis mengingat wilayah udara Israel sendiri sangatlah sempit dan terbatas. Hal tersebut ditekankan oleh Mustafa Kibaroglu yang mengatakan *“Israel might call on Turkish space for another purpose. Because Israel is so small, it needs off-shore strategic depth to sustain a credible and secure second-strike capability”* (Berelovich, 2014).

Israel menjadi salah satu mitra kerjasama Turki dalam bidang transfer teknologi. Tujuan utama Turki untuk melakukan kerjasama transfer teknologi bersama mitra kerjasamanya adalah untuk dapat memproduksi industri pertahanannya secara mandiri (Berelovich, 2014). Menurut Eyal Berelovich (2014), dalam artikelnya yang berjudul *“Turkish-Israeli Military Relations and Security Cooperation”* menyebutkan bahwa perubahan utama dalam kerjasama bilateral di bidang militer dan pertahanan antara Turki dan Israel secara umum dilatarbelakangi oleh *the Undersecretariat for Defence Industries* (juga dikenal sebagai *Savunma Sanayii Mustesarligi* (SSM))⁴ Turki yang mulai secara berangsur-angsur merubah proyek penelitian dan pengembangan (*Research and Development – R&D*) alat persenjataannya yang mulanya diproduksi oleh perusahaan asing menjadi perusahaan lokal. Industri pertahanan Turki kini telah cukup mampu untuk melakukan proyek R&Dnya secara mandiri terhadap persenjataan yang dibutuhkannya. Hal ini diperkuat oleh Ali Serdar Erdumaz (2012), dalam artikelnya yang berjudul *“Analyses Turkish-Israeli Cooperation in the Context of Turkey’s “Zero Problem” Policy”* yang mengungkapkan bahwa Turki saat ini telah memiliki beberapa perusahaan (seperti: Aselsan, TAI, Havelsan) yang dilengkapi dengan infrastruktur industri pertahanan dan teknisnya sendiri yang mendorongnya untuk mampu memprogram dan

⁴ SSM merupakan suatu badan atau mekanisme yang dibentuk oleh TSK dalam tujuannya untuk mengkoordinasikan segala urusan pada bidang industri pertahanan di Turki dan memenuhi segala kebutuhan sistem dari TSK maupun organisasi pemerintah lainnya.

melakukan proyek R&D terhadap sistem persenjataanya secara mandiri. Atas dasar tersebut, Turki kemudian merasa untuk tidak perlu bergantung pada transfer teknologi dalam kerjasamanya bersama Israel (Erdurmaz, 2012). Bahkan pada tahun 2011, beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan di Turki telah mampu untuk memenuhi lebih dari separuh permintaan persenjataan dari TSK (Berelovich, 2014). Implementasi lainnya dari keputusan SSM tersebut yaitu insentif Turki untuk melakukan pembaharuan atau *upgrade* terhadap pesawat tempur jenis Phantom F-4 ke konfigurasi Phantom 2020 oleh industri lokal atas kemampuannya yang telah cukup mampu untuk memodernisasi jenis pesawat tersebut. Salah satu pejabat SSM menegaskan kembali hal tersebut dengan mengatakan, *'The local upgrade programme does not rule out foreign technology support if and when there is need'* (Kogan, 2005). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesamaan paham diantara para pejabat di industri pertahanan Turki bahwa fasilitas penerbangan Turki mampu untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan asing.

C. Bidang Ekonomi

Bergantinya pemerintahan di Turki tidak lantas mempengaruhi hubungan diplomatiknya bersama Israel di bidang ekonomi. Pasalnya, Turki di bawah Pemerintahan AKP kembali melanjutkan berbagai kesepakatan di bidang ekonomi yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 1996 lalu, salah satunya terkait Perjanjian Perdagangan Bebas (*the Free Trade Agreement*) tahun 1996. Pada paruh awal pemerintahannya, Turki di bawah Pemerintahan AKP menjalin hubungan baik bersama Israel di bidang ekonomi. Hal ini dapat terlihat ketika nilai perdagangan di antara keduanya mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2002 yang mencapai angka \$1,2 milyar dibandingkan pada awal pembentukan kesepakatan Perjanjian Perdagangan Bebas pada tahun 1996 yang hanya menyentuh angka \$449 juta (Eroglu, Altun, & Altun, 2016). Nilai perdagangan bilateral antara Turki dan Israel kembali mengalami peningkatan di bawah Pemerintahan AKP yang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 14,6% per tahun dihitung dari tahun 2002 hingga 2008 (Eroglu, Altun, & Altun, 2016).

Hubungan diplomatik antara Turki dan Israel yang mulai mengalami krisis pada tahun 2008 paska Israel melancarkan Operasi *Cast Lead* terhadap Palestina berpengaruh terhadap hubungan politik yang dimiliki keduanya. Terlebih, ketika terjadi insiden penyerangan kapal Mavi Marmara oleh tentara Israel pada tahun 2010 yang menewaskan sembilan aktivis Turki semakin mendorong hubungan diplomatik di bidang politik diantara keduanya menegang. Turki di bawah Pemerintahan AKP yang dengan berani mengecam tindakan Israel terhadap Palestina hingga memutuskan hubungan diplomatiknya bersama Israel yang diikuti dengan penarikan masing-masing duta besarnya di negara tujuan menjadi bukti nyata memburuknya hubungan politik di antara kedua negara. Pembekuan berbagai kesepakatan di bidang ekonomi maupun militer paska terjadinya insiden Mavi Marmara turut menandai memburuknya hubungan diplomatik Turki dan Israel. Namun terlepas dari memburuknya hubungan politik antara Turki dan Israel, hubungan bilateral pada bidang ekonomi di antara keduanya tidak berpengaruh secara signifikan.

Menurut Osman Eroglu, İslam Altun, Mustafa Altun (2016) dalam artikelnya yang berjudul, "*The Political Crisis in Turkey-Israel Relations and Economic Interdependance*" menyebutkan bahwa meskipun hubungan politik Turki dan Israel mengalami ketegangan, hubungan bilateral pada sektor ekonomi di antara keduanya justru mengalami peningkatan. Krisis politik paska terjadinya Operasi *Cast Lead* dan Mavi Marmara cenderung tidak mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral di antara keduanya. Secara lebih lanjut, İlhan Güllü dan Miraç Yazıcı (2016) dalam artikelnya yang berjudul "*Describing Turkey-Israel Relationships With Its Trade Dimension*" turut menyebutkan bahwa terjadi peningkatan volume perdagangan bilateral antara Turki dan Israel sebanyak 9,93 kali lipat dari periode tahun 1995 ke tahun 2015. Volume perdagangan bilateral antara Turki dan Israel yang menunjukkan peningkatan secara signifikan menunjukkan bahwa pergantian pemerintahan di Turki serta terjadinya krisis politik di antara keduanya tidak menyulutkan nilai perdagangan bilateral di antara keduanya yang terus mengalami kenaikan. Peningkatan volume perdagangan Turki dan Israel akan dijelaskan lebih lanjut melalui tabel berikut.

Tabel 2.1
Total Perdagangan Luar Negeri Turki dan Israel
(dalam Milyar US \$)

Years	Export	Import	Balance of Foreign Trade	Foreign Trade Volume
1995	0,26	0,18	0,07	0,44
1996	0,25	0,20	0,05	0,44
1997	0,36	0,26	0,10	0,61
1998	0,44	0,29	0,16	0,73
1999	0,56	0,34	0,22	0,90
2000	0,62	0,50	0,12	1.13
2001	0,81	0,53	0,28	1,33
2002	0,85	0,54	0,31	1,39
2003	1,08	0,46	0,62	1,54
2004	1,31	0,71	0,60	2,03
2005	1,47	0,80	0,66	2,27
2006	1,53	0,78	0,75	2,31
2007	1,66	1,08	0,58	2,74
2008	1,94	1,45	0,49	3,38
2009	1,53	1,07	0,46	2,60
2010	2,08	1,36	0,72	3,44
2011	2,39	2,06	0,33	4,45
2012	2,33	1,71	0,62	4,04
2013	2,65	2,42	0,23	5,07
2014	2,95	2,88	0,07	5,83
2015	2,70	1,67	1,03	4,37

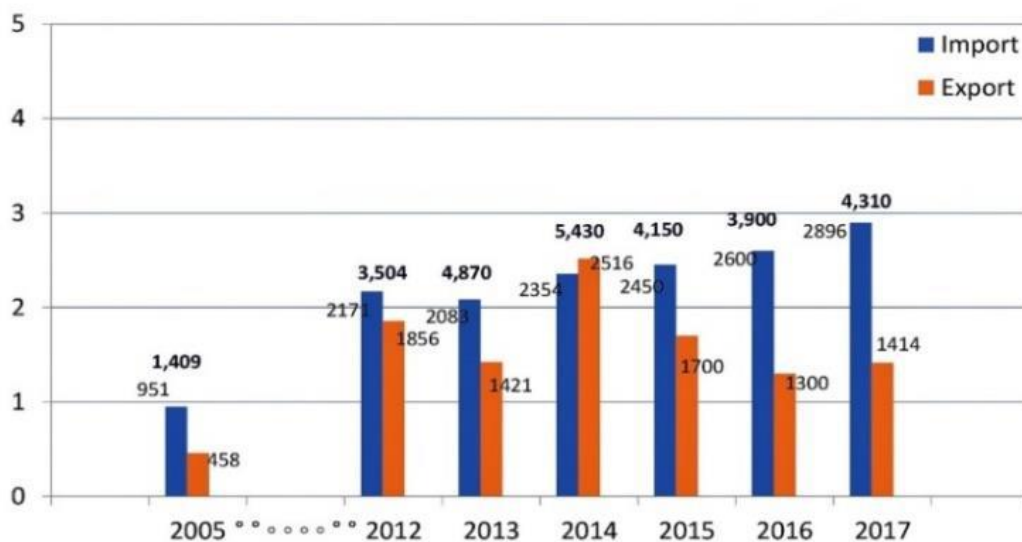
Sumber: Güllü & Yazıcı. (2016). Describing Turkey-Israel Relationships With Its Trade Dimension. *International Journal of Economics, Commerce and Management*.

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 2.1 menunjukkan adanya peningkatan total volume perdagangan antara Turki dan Israel sejak periode dimulainya kesepakatan Perjanjian Perdagangan Bebas tahun 1996 hingga Turki di bawah Pemerintahan AKP saat ini. Terhitung sejak Partai AKP memimpin Turki pada tahun 2002, hubungan bilateral perdagangan yang dimilikinya bersama Israel menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar lebih dari 10% per tahun hingga tahun 2008. Ketika mulai terjadi krisis politik antara Turki dan Israel paska terjadinya Operasi *Cast Lead* 2008, insiden PM Erdoğan yang bersetuju dengan PM Benjamin Netanyahu di *Davos World Economic Forum* 2009, hingga terputusnya dan dibekukannya berbagai kesepakatan kerjasama Turki dan Israel paska insiden Mavi Marmara 2010 justru tidak menghambat nilai perdagangan di antara keduanya mengalami peningkatan. Menashe Carmon (2018) dalam artikelnya yang berjudul “*Turkey-Israeli Economic Relations in a Period of Turbulence and Political Uncertainty*” menyebutkan alasan utama meningkatnya nilai perdagangan di tengah masa krisis politik antara Turki dan Israel dipengaruhi oleh sektor swasta (*private*). Artinya, nilai perdagangan antara Turki dan Israel yang mengalami peningkatan pada masa krisis politik paska terjadinya insiden Mavi Marmara sebagian besar lebih terpusat pada sektor swasta yang menjadi pelaku ekonomi. Terputusnya hubungan diplomatik pada tahun 2010 yang diikuti dengan pembekuan berbagai kesepakatan kerjasama mendorong Turki menghentikan atau membekukan hubungan bilateral perdagangannya bersama Israel pada level pemerintahan (publik) (Eroglu, Altun, & Altun, 2016). Namun, terhentinya hubungan bilateral perdagangan pada level pemerintah justru membuka peluang bagi sektor swasta Turki maupun Israel yang bergerak di bidang ekonomi untuk dapat menjalankan roda perekonomian di antara kedua negara yang berimplikasi pada meningkatnya volume perdagangan di antara kedua negara di sepanjang masa krisis politik. Atas dasar tersebut, Israel telah menempati posisi ke-24 sebagai negara tempat tujuan ekspor terbesar bagi Turki pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada urutan ke-16 pada tahun 2014 dengan volume perdagangan di antara keduanya mencapai lebih dari \$ 5,5 milyar (Carmon,

2018). Hal ini kemudian mengindikasikan adanya insentif dari kedua negara untuk dapat memisahkan hubungan antara bidang politik dan ekonomi (Efron, 2018).

Ketika ketegangan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel mulai berkurang dengan dilakukannya normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 2016, nilai perdagangan di antara keduanya kembali menunjukkan peningkatannya atau masih berada pada fase normalnya. Hal tersebut dapat terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2
Perdagangan Bilateral Turki-Israel (dalam Juta US \$)



Sumber: Menashe Carmon. (2018). Turkey-Israeli Economic Relations in a Period of Turbulence and Political Uncertainty. *Turkeyscope Insight on Turkish Affairs: The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies*.

Melalui grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai perdagangan bilateral antara Turki dan Israel mengalami peningkatan sejak tahun 2005 dan masih tetap berada pada fase normal ketika krisis politik terjadi tahun 2010 hingga mulai dilakukan normalisasi hubungan diplomatik kembali pada tahun 2016. Satu tahun setelah dilakukan normalisasi hubungan diplomatik, nilai ekspor Turki ke Israel pada tahun 2017 mulai menunjukkan peningkatannya kembali yang mencapai angka \$4,3 milyar. Pada tahun yang sama Israel telah menjadi salah satu dari sepuluh besar pasar ekspor terpenting bagi Turki. Turki juga telah menjadi partner perdagangan terbesar bagi

Israel dengan menempati urutan posisi ke-5 setelah Amerika Serikat, Inggris, China, dan Belanda (Efron, 2018).

Selain itu, bidang turisme atau pariwisata turut menjadi bagian penting yang memberikan kontribusi pada bidang perekonomian kedua negara. Turki menjadi salah satu destinasi wisata paling populer bagi penduduk Israel. Selama krisis politik Mavi Marmara berlangsung, bidang turisme tidak berhenti secara sepenuhnya namun cenderung mengalami penurunan hingga 80.000 wisatawan per tahunnya (Efron, 2018). Bidang Turisme kembali menunjukkan peningkatannya paska dilakukannya normalisasi hubungan diplomatik di antara kedua negara yang menyentuh angka sekitar 200.000 wisatawan Israel yang mengunjungi Turki pada tahun 2016. Pada akhir tahun 2016, jumlah wisatawan Israel yang mengunjungi Turki kembali meningkat menjadi 293.988 orang (Efron, 2018).

2.3 Peran Turki dalam Konflik Israel dan Palestina

Kehadiran Turki di dalam konflik Israel-Palestina sejatinya mulai dilakukan secara baik di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Bulent Ecevit dan mulai secara intensif dilakukan ketika Turki berada di bawah Pemerintahan AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*).

2.3.1 Periode 1960-1990

Selama Republik Turki berdiri hingga masa Perang Dingin, keterlibatan Turki dalam konflik Israel Palestina hanya dilakukan bersamaan dengan negara-negara Barat. Hal ini dikarenakan sejak Republik Turki berdiri, Turki mendasarkan politik luar negerinya yang berkiblat pada negara-negara Barat atau pro-Barat. Selanjutnya, arah Politik Luar Negeri Turki pada tahun 1960an menunjukkan keterlibatan pasif Turki di dalam konflik Israel-Palestina. Turki menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang dapat diinterpretasikan sebagai suatu hal yang menyimpang dari politik luar negerinya yang sekuler dan pro terhadap Barat apabila Turki melibatkan diri di kawasan Timur Tengah. Namun, keadaan mulai berubah pada akhir tahun 1960an ketika Turki mulai menunjukkan keterlibatannya dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Turki pada pertemuan OKI dalam membahas mengenai pembakaran api di Masjid Al Aqsa Yerussalem pada tahun 1969 dan

pengakuan Turki terhadap *Palestinian Liberation Organization* (PLO) pada tahun 1975 (Bayraktar, 2019). Pengakuan Turki terhadap entitas PLO semakin diperjelas oleh pernyataan dari Ekrem Guvandiren sebagai salah satu perwakilan *chargé d'affaires* Turki yang berada di Israel dengan mengatakan “*Turkey recognized the PLO as the legitimate representative of the Palestinian people and respects the decision taken at the Palestine National Council meeting in Algiers*” (Freedman, 1991). Keputusan Israel untuk memindahkan ibukota dari Tel Aviv ke Yerusalem yang dikenal dengan sebutan *Jerusalem Act* pada tahun 1980 yang mendorong Turki untuk menurunkan level diplomatiknya di Israel menjadi *Second Secretary* turut menunjukkan keterlibatan Turki dalam konflik tersebut (Fadel, 2018). Hal ini dilakukan Turki sebagai suatu respon atas sikap Israel yang memutuskan untuk memindahkan ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem secara sepihak yang mendorong Turki untuk menempatkan perwakilan diplomatiknya yang diturunkan menjadi Sekretaris Kedua.

Memasuki tahun 1990an, isu Palestina dalam kaitannya dengan konflik Israel-Palestina belum menjadi prioritas utama bagi politik luar negeri Turki. Namun dalam peranannya, Turki tetap berupaya untuk menjalankan politik luar negeri yang berimbang dalam menghadapi Israel dan Palestina. Di satu sisi, Turki mulai menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral bersama Israel mulai tahun 1996 sedangkan di sisi lain, Turki juga menunjukkan arah politik luar negerinya terhadap Palestina dengan membuka kantor konsulat Turki di Yerusalem (Bayraktar, 2019). Adanya aksi-aksi kekerasan, seperti: pembunuhan besar-besaran oleh Baruch Goldstein terhadap warga Palestina di Hebron tahun 1994 yang diikuti dengan gelombang serangan bunuh diri oleh Hamas maupun kelompok jihad Islam yang menargetkan masyarakat sipil Israel turut mengundang kecaman bagi Turki terhadap aksi-aksi kekerasan tersebut terhadap kedua pihak (Bayraktar, 2019).

Selain itu, Turki turut menunjukkan kontribusinya dengan terlibat dalam misi pengamatan perdamaian internasional pada tahun 1997 hingga 2003 yang dikenal sebagai misi *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH) bersama Italia, Swiss, Denmark, Norwegia, dan Swedia (Bayraktar, 2019). Pada dasarnya, TIPH

merupakan proyek misi pengamatan yang dilakukan atas adanya aksi pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Baruch Goldstein pada tahun 1994. TIPH telah mulai beroperasi sejak bulan Mei hingga Agustus pada tahun 1994 atas adanya mandat dari Perjanjian Oslo I serta adanya kesepakatan dari perwakilan Israel dan PLO yang memiliki tujuan awal untuk mengambil langkah dalam menjamin keamanan dari masyarakat Palestina (Baruch & Zur, 2019). Namun dalam perjalanannya, para pengamat dalam proyek TIPH harus mundur dari Hebron atas penolakan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang tidak menginginkan dilanjutkannya mandat dari proyek tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, proyek TIPH kembali dilanjutkan atas adanya mandat dari Perjanjian Oslo II tahun 1995 yang menginginkan Israel untuk menarik mundur pasukannya dari kota Hebron. Bersamaan dengan hal tersebut, Israel, PLO, dan kelima negara yang terlibat dalam misi pengamatan TIPH menandatangani suatu kesepakatan yang dikenal dengan sebutan *the Protocol Concerning the Redeployment in Hebron* pada tahun 1997 yang menandai dibentuknya tim pengamat dari kelima negara untuk melakukan misi pengamatannya di kota Hebron (Baruch & Zur, 2019). Keberlangsungan aktivitas TIPH dilakukan berdasarkan mandat kesepakatan sebelumnya yang diperpanjang setiap enam bulan oleh semua pihak yang terlibat. Partisipasi Turki pada misi pengamatan internasional tersebut sejatinya memiliki tujuan utama untuk memonitor atau memantau dan melaporkan evakuasi Kota El-Halil (Hebron) di sekitar *West Bank* oleh angkatan bersenjata Israel dan transfer wilayah tersebut ke administrasi nasional Palestina (Güngör, 2007). Selain itu, TIPH memiliki misi utama dalam memonitor dan melaporkan keberlangsungan kehidupan normal di kota Hebron, yang di dalamnya termasuk menjamin keamanan bagi masyarakat Palestina dan berupaya untuk membuat proyek dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Palestina. Aktivitas pengamatan pada misi TIPH tidak melibatkan unsur militer maupun terlibat dalam konflik Israel Palestina melainkan hanya memainkan fungsinya dalam mendokumentasikan dan melaporkan situasi yang ada di kota Hebron secara umum maupun dalam kaitannya dengan insiden-insiden tertentu yang pernah terjadi. Laporan tersebut kemudian akan diserahkan pada otoritas Israel

maupun Palestina beserta kelima negara yang terlibat dalam misi pengamatan TIPH. Keikutsertaan Turki dalam misi pengamatan TIPH ditekankan kembali oleh Abdullah Güll yang menekankan peran mediator Turki dengan mengatakan,

“Turkey’s participation in the TIPH (Temporary International Presence in Hebron) that aims to reduce the tension between Israeli settlers and Palestinian in the city of Hebron falls in line with “good offices, facilitator and mediator” roles that Turkey has been playing in the Israeli-Palestinian peace process” (Güney, 2017).

2.3.2 Periode 2000an

Politik luar negeri berimbang yang dilakukan Turki terhadap Israel dan Palestina menjadi lebih sulit dilakukan ketika memasuki tahun 2000an. Hal ini dikarenakan aksi-aksi kekerasan yang telah mendominasi wilayah Palestina, khususnya di sekitar Yerusalem, Gaza, maupun Tepi Barat atas adanya insiden tewasnya empat warga Palestina oleh polisi Israel dalam aksi protes yang dilakukannya di Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada bulan September tahun 2000 (Bayraktar, 2019). Keadaan semakin diperparah ketika muncul fenomena Al-Aqsa Intifada dimana Ariel Sharon melakukan kunjungan di Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada tahun 2000 yang dipandang masyarakat Palestina sebagai aksi unilateral dalam menentukan status Yerusalem tanpa menerima penyelesaian melalui jalan negosiasi. Fenomena tersebut berlanjut ketika Ariel Sharon yang menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 2001 melakukan aksi-aksi unilateral dalam menghapus badan-badan yang dibentuk oleh Perjanjian Perdamaian Oslo yang gagal untuk diimplementasikan, menghancurkan gedung-gedung pemerintahan Otoritas Palestina, menargetkan aksi-aksi penyerangan terhadap Satuan Keamanan Palestina, pemberlakuan pos-pos keamanan oleh tentara Israel yang menjadikan penghalang fisik terhadap garis perbatasan antara Israel dan Palestina yang sesuai dengan perjanjian perbatasan tahun 1947, hingga pelabelan Yasser Arafat sebagai “teroris” oleh Israel (Bayraktar, 2019). Kebijakan Israel yang menekan warga Palestina tersebut kemudian diikuti dengan munculnya pemberontakan warga Palestina yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di sekitar Tepi Barat dan Gaza yang berimplikasi pada tewasnya 3.315 warga Palestina (Bayraktar, 2019). Dalam

merespon hal tersebut, kelompok-kelompok jihad Islam di Palestina, seperti: Hamas, Al Aqsa Martyrs Brigades, dan PLO kemudian melakukan aksi-aksi serangan bunuh diri yang menewaskan 745 masyarakat sipil di Israel (Bayraktar, 2019). Atas adanya fenomena tersebut, Turki kemudian menyalahkan Ariel Sharon atas terjadinya eskalasi kekerasan di wilayah Palestina atas kebijakan Israel terhadap warga Palestina yang terlalu keras. Turki turut mengkritisi sikap Israel terhadap Yerusalem serta mempertahankan hak-hak Palestina untuk memiliki negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara (Bayraktar, 2019). Turki yang memandang status Yerusalem sebagai suatu hal yang sensitif yang diikuti dengan dominasi kericuhan dan kekerasan di dalamnya telah membatasi Turki untuk melanjutkan kebijakan seimbangannya terhadap Palestina dan Israel yang pada akhirnya mengharuskan Turki untuk berada di sisi Palestina dalam konflik Israel-Palestina tersebut.

Menurut Esra Çuhadar Gürkaynak (2007) dalam artikelnya, *“Turkey as a Third Party in Israeli-Palestinian Conflict: Assessment and Reflections”* menyebutkan bahwa keterlibatan Turki dalam konflik Israel dan Palestina pada tahun 2000an sejatinya memainkan perannya sebagai fasilitator berdasarkan kemampuan dan kredibilitas yang dipandang oleh Israel dan Palestina. Turki yang memiliki hubungan baik dan dekat dengan Israel maupun Palestina telah mendorong kedua negara tersebut untuk meminta bantuan pada Turki untuk berkontribusi dalam proses perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini terlihat ketika Yasser Arafat mengunjungi Ankara pada tahun 2000 untuk mencari dukungan politik Turki dengan mengatakan bahwa *“We want Turkey who has the trust of both Palestinians and Israelis should remain in the course and contribute to the process”* (Bayraktar, 2019). Hal yang sama juga dilakukan Israel dimana Perdana Menteri Ariel Shraon melakukan kunjungan ke Turki pada tahun 2001 untuk bertemu Perdana Menteri Bulent Ecevit dalam mencari dukungan politik.

Salah satu peran Turki yang memainkan perannya sebagai fasilitator yang efektif tercermin dalam kontribusi Turki, khususnya mantan Presiden Turki yaitu Süleyman Demirel yang terlibat pada misi perdamaian internasional *the Mitchell Inquiry Commission* pada tahun 2000. Dalam hal ini, Turki memainkan perannya

sebagai Komite Pengamatan terkait dengan konflik Israel-Palestina yang memberikan saluran komunikasi di antara kedua belah pihak dengan menyampaikan pesan, menjelaskan rasionalitas perilaku antara satu sama lain, memberikan ruang atau tempat yang aman bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mengadakan pertemuan dimana Turki juga menjadi tuan rumah dalam suatu konferensi perdamaian, serta melobi dan memberikan saran bagi negara-negara Arab, Amerika Serikat, dan Uni Eropa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tujuannya untuk meningkatkan proses negosiasi dan *peace-making* di dalam konflik tersebut (Gürkaynak, 2007). Pada 30 April 2001, komisi pengamatan tersebut mengeluarkan *the Mitchell Report* yang di dalamnya berisi evaluasi penyebab dan konsekuensi dari munculnya Intifada Palestina, menyerukan pembangunan kepercayaan bersama dan dilakukannya negosiasi lanjutan bagi otoritas Palestina dan Pemerintah Israel dalam membentuk suatu keadaan yang damai atau tenang, serta meminta Palestina untuk mencegah operasi teroris dan menghukum pelaku teroris (Bayraktar, 2019).

Selain itu, Menteri Luar Negeri Turki, Ismail Cem turut berkontribusi dalam menyerukan solusi perdamaian pada konflik Israel Palestina yang berdasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB ketika dilaksanakan *joint forum* antara *Organisation of Islamic Cooperation (OIC) - European Union (EU)* di Ankara pada tanggal 13 Februari 2002 (Bayraktar, 2019). Pada tahun yang sama, Turki melalui Perdana Menteri Bulent Ecevit mengecam aksi operasi militer Israel dan menyebut aksi pembunuhan besar-besaran di Kota Jenin, Palestina sebagai aksi “genosida” (Gürkaynak, 2007). Turki turut menjadi salah satu negara yang meminta Israel untuk melepaskan Yasser Arafat dari kepungan penjara rumah di wilayah Ramallah dan menyerukan AS untuk memperingati Israel atas tindakan tersebut. Hal ini kemudian dibuktikan dari pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Turki, Uğur Ziyal kepada Diplomat AS, Robert Pearson dengan menyatakan, “*If Arafat is eliminated it will have serious consequences. All the countries attitude will be affected, including that of Turkey*” (Bayraktar, 2019).

Pada dasarnya, aksi-aksi unilateral yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah menurunkan intensitas hubungan yang terjalin antara Turki dan Israel,

khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pos-pos keamanan baru, pembangunan dinding keamanan, serta pengaturan sepihak Israel terkait dengan status Yerusalem. Ketegangan antara Turki dan Israel mulai meningkat ketika pemimpin Hamas dan penggantinya, Sheikh Ahmad Yassin dan Abdulaziz Rantisi terbunuh pada tahun 2004 yang kemudian mendorong kritik keras dari Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan yang memandang aksi-aksi penyerangan tersebut sebagai aksi “pembunuhan” dan “teror” (Bayraktar, 2019). Namun pada tahun yang sama, ketika Ariel Sharon kemudian memutuskan untuk mundur dari Gaza telah mendapatkan sambutan baik oleh Turki yang kemudian menjadi penanda menurunnya intensitas ketegangan di antara kedua negara.

Peran Turki sebagai fasilitator menjadi lebih penting ketika Turki menginisiasi dibentuknya *Ankara Forum for Economic Cooperation between Palestine, Israel, and Turkey* pada awal tahun 2005 sebagai suatu *platform* yang memainkan peranan penting sebagai mekanisme dialog perdamaian permanen di antara para pebisnis dari 3 pihak, yaitu: Palestina, Israel, dan Turki (Bayraktar, 2019). Dialog pertemuan pertama yang dilakukan pada bulan April tahun 2005 kemudian menghasilkan ide dari Turki untuk mengerahkan suatu badan yang dikenal dengan *the Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges* (TOBB) di sekitar wilayah Erez. Turki berkontribusi dalam pengelolaan zona industri Erez melalui *the Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges* (TOBB) pada tahun 2005. TOBB yang mengambil alih pengelolaan zona industri Erez di Gaza memiliki tujuan utama untuk menarik investasi di sekitar area tersebut yang nantinya hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perluasan lapangan kerja bagi ratusan warga Palestina (Gürkaynak, 2007). Dalam peranannya, proyek TOBB tidak hanya merepresentasikan kontribusinya terhadap dibukanya lapangan pekerjaan, pengembangan sektor swasta, dan pembangunan kapasitas ekonomi dan sosial di Palestina, namun juga merepresentasikan peningkatan keamanan bagi Israel (Gürkaynak, 2007).

Turki di bawah Pemerintahan AKP memainkan babak baru yang mulai menunjukkan keberaniannya dalam membentuk politik luar negerinya yang lebih pro-aktif. Hal ini terbukti dari aksi Turki yang mengakui kemenangan Hamas pada pemilu

2006 dan menerima kunjungan dari pemimpin Hamas, Khaled Meshal ke Ankara pada Februari tahun 2006. Pada dasarnya, kedatangan Meshal ke Ankara meminkan peranan yang penting bagi Turki sebagai fasilitator dalam kepentingannya untuk memberikan arahan dan pesan bagi Hamas untuk meraih suatu perdamaian dan demokrasi, menekankan tanggung jawab politiknya, serta memberikan arahan untuk dapat memodifikasi kebijakan-kebijakannya yang dianggap radikal (Gürkaynak, 2007). Selanjutnya, peran Turki sebagai fasilitator turut berkontribusi terhadap diadakannya pertemuan di Ankara pada tahun 2007 yang dihadiri oleh masing-masing Presiden dari kedua belah pihak, yaitu: Shimon Peres dan Mahmoud Abbas. Pertemuan tersebut sejatinya memiliki tujuan utama untuk mendirikan taman industri yang disponsori oleh Turki di sekitar wilayah West Bank (Bayraktar, 2019).

Ketegangan antara Turki dan Israel mulai mencuat kembali atas dilancarkannya Operasi *Cast Lead* di Jalur Gaza oleh Israel pada akhir tahun 2008. Operasi yang menargetkan pengeboman terhadap gedung-gedung kepolisian, gedung-gedung pemerintahan, basis-basis operasi Hamas, rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, maupun masjid telah berkontribusi terhadap tewasnya 1.284 orang dan 4.336 orang lainnya mengalami luka-luka yang sebagian besar korban tersebut adalah masyarakat sipil (Erdurmaz, 2012). Atas dasar tersebut, Turki kembali menunjukkan keterlibatannya di dalam konflik Israel-Palestina dengan mengecam dan melakukan kritik keras terhadap Isrel. Hal ini tercermin dari kritik keras yang dilayangkan Erdoğan terhadap Shimon Peres di dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pada tahun 2009 yang mengatakan "*When it comes to killing, you know well how to kill*" (Bayraktar, 2019). Alhasil, insiden Perang Gaza pad tahun 2008 menjadi titik penanda awal meregangnya hubungan antara Turki dan Israel dan semakin menguatkan politik luar negeri Turki yang cenderung pro terhadap Palestina.

Adanya insiden penyerangan kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara yang menewaskan 9 aktivis Turki di perairan internasional oleh Israel turut berimplikasi pada ditariknya Duta Besar Turki di Tel Aviv serta dibekukannya latihan militer oleh Turki terhadap Israel. Tidak hanya itu, insiden tersebut telah menjadi titik balik utama diputuskannya hubungan diplomatik antara Turki dan Israel. Pelayaran kapal Mavi

Marmara yang ditunjukkan untuk memecahkan blokade Israel di Jalur Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan yang berujung pada penyerangan Israel di sekitar perairan internasional telah mengundang kecaman dari Erdoğan yang mengatakan bahwa, “*This action, totally contrary to the principles of international law, is inhumane state terrorism. Nobody should think we will keep quiet in the face of this*” (Alsaftawi, 2017). Tak berhenti sampai disitu, politik luar negeri Turki di bawah AKP yang cenderung pro terhadap Palestina tetap dilakukan dengan melakukan aksi-aksi, seperti: mengakui Hamas sebagai kesatuan politik yang sah, mendukung Fatah dan Hamas sebagai kelompok politik untuk dapat bersatu, melegitimasi tindakan Israel yang menggunakan kekuatan secara berlebihan yang ditujukan terhadap warga Palestina, mengkritisi pengaturan sepihak Israel terkait dengan status Yerusalem, garis-garis perbatasan antara Israel dan Palestina, serta meningkatkan upaya untuk menghentikan blokade Israel terhadap Jalur Gaza (Bayraktar, 2019). Meskipun normalisasi hubungan antara Turki dan Israel secara resmi dilakukan pada tahun 2016, arah politik luar negeri Turki yang cenderung pro terhadap Palestina di bawah Pemerintahan AKP masih terus digalakkan hingga saat ini.

Secara sederhana, bab ini menjelaskan mengenai konflik Israel dan Palestina secara umum, dinamika hubungan Turki dan Israel yang dimulai saat sebelum Pemerintah AKP berkuasa hingga saat Pemerintah AKP berkuasa di Pemerintahan Turki, dan peran yang diambil Turki di dalam konflik Israel dan Palestina. Kontribusi Turki yang berperan di dalam konflik Israel dan Palestina secara aktif di bawah Pemerintah AKP telah menunjukkan arah kebijakan Turki yang kini lebih condong pada Palestina dibandingkan Israel. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap surutnya hubungan diplomatik yang dijalin Turki bersama Israel. Penekanan terhadap arah kebijakan luar negeri Turki yang memainkan peran aktifnya di dalam konflik Israel dan Palestina telah memberikan bukti kuat bahwa Turki akan terus memainkan perannya sebagai *peacemaker* dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina secara damai.